

LAPORAN HASIL  
PENELITIAN

RISET KOMPETITIF 2018

KLUSTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

STRATEGI PENGEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH UIN IB PADANG  
DALAM MENINGKTKAKAN MUTU LULUSAN



Oleh :

RIDHA MULYANI,SH,MH,  
DRA. NAILUL RAHMI, M.Ag

FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN 2018



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Jurusan Hukum Tata Negara UIN Ib” (Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan) ini disusun selama kurang lebih enam bulan. Penelitian ini dilatarbelakangi ditransformasinya IAIN IB menjadi UIN IB, dengan sendirinya tentu tantangan semakin berat, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan mutu lulusan.

Akhirnya penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya setelah memperoleh berbagai saran, kritik, dan masukan dari rekan sejawat dan reviewer di Universitas Negeri Islam Negeri IB. Semoga laporan penelitian ini dapat dibaca dan dimanfaatkan dalam pengembangan mutu pendidikan di UIN IB dan khususnya jurusan Hukum Tata Negara/JS Fakultas Syariah, pada khususnya.

Ucapan Terimakasih dari Tim Peneliti diucapkan kepada LP2M D dan Rektor UIN IB beserta jajarannya yang telah mengizinkan kami turut berpartisipasi dalam Penelitian Dosen ini.

Dan teristimewa rekan-rekan dosen jurusan HTN/JS yang telah banyak memberikan masukan, sumbang dan saran terhadap kesempurnaan penelitian ini terhadap penelitian ini.

Akhirul kalam, tiada gading yang tak retak, kepadaNya jualah penulis berserah diri

Padang, November 2018  
Tim Peneliti

1. Ridha Mulyani,SH,MH
2. Dra. Nailul Rahmi,MAG



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Teori Pengebagan Organisasi.....	13
B. Teori Kurikulum .....	14
C. Dimensi Horizontal dan Vertikal .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Metode Pendekatan .....	25
C. Metode Pengumpulan Data .....	25
D. Pengelolaan Data .....	26
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
<b>BAB IV PENUTUP DAN KESIMPULAN</b> .....	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>89</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang resmi berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol. Perubahan tersebut tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2017. Perpres perubahan ini sendiri sudah sudah ditandatangani Presiden Jum'at 31 Maret 2017.

Dengan perubahan IAIN Ke UIN, IAIN dapat mendirikan fakultas-fakultas umum dan dengan sendirinya eksistensi lulusan dan lingkup kerja semakin luas dan banyak. Tentu Lulusan IAIN IB / UIN IB Padang akan memasuki wilayah atau lingkungan kerja yang lebih luas, bervariasi dan bergengsi tentu itu pula yang diharapkan oleh IAIN IB Padang, perubahan IAIN menjadi UIN harus diiringi dengan penyelenggaraan pendidikan yang profesional, tidak seperti yang dikuatirkan oleh Rektor IAIN IB DR. Eka Putra Warman "UIN Rasa IAIN" perubahan IAIN IB menjadi UIN, adalah akan melahirkan lulusan yang berkualitas tinggi, sebagaimana dengan yang tersirat dalam Visi IAIN, yakni menjadi Perguruan Tinggi Islam yang kompetitif di ASEAN Tahun 2037, artinya didalam visi adanya suatu harapan bahwa sarjana yang akan dihasilkan adalah sarjana yang mampu berkopetensi keluar, tidak hanya di Sumbar Indonesia tapi lebih jauh lagi yakni di Asean

Alih statusnya IAIN IB menjadi UIN Imam Bonjol merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan dan menangkap peluang. Strategi alih status IAIN IB ke UIN itu ternyata mampu mendorong minat masyarakat untuk belajar di IAIN / UIN IB, saat ini jumlah mahasiswa baru UIN/ IAIN IB bertambah 3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah mahasiswa UIN IB angkatan tahun 2017 ini adalah, sebanyak 3200 orang, dan untuk Fakultas Syariah adalah sebanyak 684 orang dan untuk jurusan Jinayah adalah sebanyak 200 orang.

Di samping itu, perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peranserta dosen dan mahasiswa serta alumni IAIN dalam kehidupan masyarakat..

Arus globalisasi saat ini yang melahirkan lingkungan persaingan yang semakin kompetisi. kehadiran UIN harus seanehtiasa memiliki kebermaknaan peran dan fungsi dalam pengembangan masyarakat dan bangsa Indonesia Di samping itu, perubahan IAIN menjadi UIN merupakan upaya revitalisasi perguruan tinggi Islam di tengah-tengah kecenderungan masyarakat yang lebih meminati pendidikan yang dapat memberikan kemampuan teknologis dibanding pendidikan agama yang bersifat etis( *Jurnal Adminisistrasi Pendidikan Vol.XIV No.1 April 2012*). Dampaknya, terjadi penurunan minat masyarakat terhadap IAIN dari tahun ke tahu,.. membiarkan aset bangsa ini tetap pada status IAIN yang berakibat menurunnya peminat untuk memasukinya, merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Sebab, tidak mustahil perguruan tinggi ini akan “ditutup” karena tidak ada lagi peminatnya ( Natsir, 2006: 9 dalam jurnal *Jurnal Adminisistrasi Pendidikan Vol.XIV No.1 April 2012* )

Oleh karena itulah dengan tranformasi IAIN ke UIN , harus diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan,dengan pendidikan yang bermutu kan melahirkan lulusan yang berkualitas. yang pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) Input; (2)Proses; (3)Output; dan (4)Outcomes. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa indikator,beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasarkerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan



kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar

Agar tercapainya kualitas lulusan maka perlu diperhatikan proses pembelajarannya, oleh sebab itu dalam proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik, agar tercapainya kualitas yang baik pula dari lulusannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) capaian pembelajaran (**learning outcomes**) yang jelas;
- 2) Organisasi PT yang sehat;
- 3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel
- 4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasarkerja;
- 5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional;
- 6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai | Buku K-DIKTI.2014)

Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu lulusan yang dihasilkan dalam lembaga pendidikan. sebagian pihak percaya bahwa ((peningkatan lulusan harus dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan ada juga dengan meningkatkan kualitas kinerja guru/dosen. Dan lainnya sebagai mana yang telah ditetapkan oleh diktis diatas, semua itu adalah untuk peretas jalan dalam rangka membantu meningkatkan pendidikan yang bermutu.

Salah satu ponit dalam meningkatkan kualitas lulusan adalah adalah ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pasar .sebagaimana yang dikatakan oleh Rektor UB

Prof. Dr. Ir Yogi Sugito dalam sambutannya mengatakan, kurikulum merupakan hal yang sangat strategis dan menjadi ujung tombak dalam menentukan kualitas lulusan, Salah satu alasan banyaknya sarjana menganggur adalah karena kurikulum program studi perguruan tinggi tidak sesuai lagi bagi kebutuhan masyarakat, untuk itu kurikulum seharusnya dimodifikasi atau dirancang mengikuti perkembangan IPTEK sehingga tidak ada mata kuliah yang kedaluwarsa,"( Prasetya Online,Humas UB ,2013) dalam evaluasi kurikulum ,Prof. Supartha memaparkan, profil lulusan harus ditentukan. Profil lulusan merupakan kemampuan pembeda yang harus dimiliki seorang lulusan. Jika profil lulusan sudah ditetapkan, akan menghasilkan capaian pembelajaran atau *learning outcomes*.

Keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan serta menjadi lulusan yang berkualitas, tentunya bisa menjadi tolok ukur keberhasilan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran. Satu diantara inti keberhasilan pendidikan ini tergantung dari kemampuan tenaga pendidik dalam menjalankan kurikulum pendidikan pada masing-masing program studi. Demikian disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Riau (Unri) Prof Dr Ir Thamrin MSc, saat membuka acara Workshop Penguatan dan Penataan Ulang Kurikulum di [http : // unri. ac. Id / 2018 / 05 / 23 / kurikulum](http://unri.ac.id/2018/05/23/kurikulum) , Kurikulum merupakan pedoman yang berisi tentang materi, tujuan, metode dan alokasi waktu, dengan kata lain dalam kurikulum akan memuat tentang kompetensi yang akan dihasilkan pembelajaran dan dimiliki oleh lulusan setelah program waktu tertentu. Untuk itu karena merupakan kerangka untuk menuju pada kompetensi lulusan, maka dalam program kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pengguna.

Disamping itu Perguruan Tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misi, serta mampu memenuhi

kebutuhan/memuaskan stakeholders yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu. Sebuah proses pendidikan yang bermutu tentunya harus juga didukung oleh faktor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu pula. (Jurnal Penomena , 2014)

Jurusan Jinayah Siyasa yang saat ini telah menstranformasi menjadi jurusan Hukum Tata Negara adalah salah satu jurusan dari 4 jurusan yang ada di Fakultas Syariah diharapkan dan menjadi harapan baru bagi UIN IB dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Alih status IAIN IB Padang ke UIN IB Padang, tentunya akan menjadi tugas berat bagi jurusan Jinayah Siyasa dalam menyajikan mutu pendidikan yang berkualitas dan akan melahirkan lulusan yang kualitas dan memiliki daya saing.

Alih ststus tadi menimbulkan pekerjaan rumah yang tidak mudah, yang harus segera dituntaskan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ada **beberapa pertanyaan yang perlu dijawab** *Pertama,apakah sudah* terwujud keterkaitan antara kurikulum HTN saat ini dengan profil lulusan dan visi misi jurusan hokum Tata Negara ?.....

### **Visi dan Misi menjadi Pusat Pengemangan Keilmuan Ketatanegaraan Islam di sumbar tahun 2030 Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum ketatanegaraan Islam;
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian serta pengembangan ilmu dibidang hukum ketatanegaraan Islam
3. Menyalin kerjasama dengan berbagai istitusi terkait dalam memperkuat pengembangan program study hokum ketatanegaraan Islam.

## Profil Lulusan

Hakim, Advokat, Konsultan, Analis dan Legal Drafter.

**Kurikulum jurusan HTN** tahun ajaran 2017/2018 dapat kita lihat dibawah ini :

### Semester I

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	11101	Pancasila	2
2	11102	Bahasa Indonesia	2
3	11103	Bahasa Inggris	2
4	11104	Bahasa Arab Istima' wa Takallum	2
5	11105	Pengantar Studi Qur'an dan Hadits	dap2
6	11106	Pengantar Studi Hukum Islam	2
7	121020001	Ilmu Negara	2
8	121020002	Sejarah Hukum Ketatanegaraan Islam	2
9	121020003	Pengantar Ilmu Hukum	2
10	121020004	Sejarah Pemikiran Hukum Islam	2
11	12102005	Fikih Ibadah	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

Cat, sejarah hk, ketatanegaraan islam sebaiknya diberika setelah,pengantar studi

### Semester II

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	21101	Kewarganegaraan	2
2	21102	Bahasa Arab Qiraah wa Kitabah	2
3	21103	Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam	2
4	21104	Pengantar Studi Pemikiran Islam	2

5	221020001	Pengantar Ushul Fikih	2
6	221020002	Hukum Ketatanegaraan Islam	2
7	221020003	Akhlaq	2
8	221020004	Pengantar Hukum Indonesia	2
9	221020005	Reading Teks on Islamic Law	2
10	221020006	Fikih Amali	2
11	221020007	Ilmu Falak	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester III

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	31101	Filsafat Ilmu	2
2	321020001	Fikih Muamalah	2
3	321020002	Hukum Perdata	2
4	321020003	Hukum Tata Negara	2
5	321020004	Hukum Pidana	2
6	321020005	Fikih Munakahat	2
7	321020006	Metodologi Istimbath Hukum Islam	2
8	321020007	Fikih Mawaris	2
9	321020008	Fikih Jinayah	2
10	321020009	Hukum Administrasi Negara	2
11	321020010	Dasar-Dasar Hukum Ketatanegaraan Islam	2
12		Pratikum Ibadah	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester IV

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	41101	Metodologi Penelitian	2
2	42102	Islam dan Adat Minangkabau	2
3	421020001	Hukum Perwakafan	2
4	421020002	Hukum Internasional	2

5	421020003	Hukum Keuangan Islam	2
6	421020004	Ilmu Mantik/smesestinya diawal	2
7	421020005	Hukum Perundang-Undangan Islam	2
8	421020006	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
9	421020007	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	2
10	421020008	Studi Naskah	2
11	421020009	Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester V

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	521020001	Hukum Humaniter	2
2	521020002	Hukum Pajak	2
3	521020003	Hukum Agraria	2
4	521020004	Hukum Acara Peradilan Agama	2
5	521020005	Hukum Acara Perdata	2
6	521020006	Hukum Acara Pidana	2
7	521020007	Perancangan Peraturan PerUndang-Undangan	2
8	521020008	Metode Penelitian Hukum	2
9	521020009	Lembaga Kepresidenan	2
10	521020010	Hukum Konstitusi	2
11	521020011	Fikih Mawaris(2 x)	2
12		Pratikum Peradilan Semu	0
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester VI

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	621020001	Pemilu dan Partai Politik	2
2	621020002	Politik Hukum	2
3	621020003	Kaidah Fikih	2
4	621020004	Hukum HAM	2

5	621020005	Filsafat Hukum Islam	2
6	621020006	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
7	621020007	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
8	621020008	Retorika Hukum	2
9	621020009	Kepaniteraan	2
10	621020010	Praktek Peradilan Agama	2
11	621020011	Hukum Adat	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester VII

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	721020001	Sosiologi Hukum	2
2	721020002	Etika Profesi Hukum	2
3	721020003	Teori dan Praktek Bantuan Hukum	2
4	721020004	Politik dan Demokrasi	2
5	721020005	Kapita Selektta Hukum Tata Negara	2
<b>JUMLAH</b>			<b>10</b>

### Semester VIII

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	81101	KKN	4
2	81102	Skripsi	4
<b>JUMLAH</b>			<b>8</b>

Kemudian perubahan menjadi universitas telah menambah beban tersendiri bagi perguruan tinggi Islam. Sebab, resiko universitas memikul beban fakultas dan jurusan dengan beberapa disiplin ilmu, *Kedua apakah* fakultas syariah dan khususnya untuk jurusan Hukum Tata Negara sudah memenuhi Tenaga Pendidik/ Dosen yang sesuai dengan kebutuhan dengan bidang ketatanegaraan yang dikembangkan? sebab jurusan yang

sebelum dikembangkan adalah jurusan Jinayah Siyasa ( Pidana Islam dan Tata Negara Islam)

**Ketiga** apakah Proses Belajar dan Mengajar telah mendukung untuk mencapai kriteria yang sesuai dengan profil lulusan.?

Pertanyaan ini, ini penting dan terkait dengan pengembangan prodi, saya kutip dari pendapat yang dikemukakan oleh mengutip pendapat Gary Dessler mengatakan bahwa ciri umum pengembangan perubahan organisasi yang telah direncanakan. ( Educare Vol 4, No. 2.tahun 2007)

Organisasi adalah suatu strategi pendidikan yang dimaksudkan untuk menimbulkan Ada empat tipe pengembangan organisasi, yakni pengembangan teknologi, pengembangan produk, administratif dan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan teknologi berkenaan dengan proses pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan layanan yang strategis, dan teknologi pendidikan yang dapat menunjang PBM perubahan organisasi yang telah direncanakan.( Educare Vol 4, No. 2.tahun 2007).

Bila diperhatikan dari visi dan misi dari Jurusan HTN fakultas syariah diatas, yang dibutuhkan dan dikembangkan adalah Jurusan HTN )adalah seperangkat keilmuan dalam bidang tatanegaraan dan hokum yang mampu memberikan kepada mahasiswa pola berpikir kritis, cerdas, dan universal tentang nilai-nilai keilmuan tersebut.sehingga lulusan yang dihasilkan menjadi bermutu dan mempunyai daya saing.

Oleh sebab itu jurusan sebagai ujung tombak dari PT dalam khususnya fakultas, harus mempunyai strategi agar mahasiswa yang diluluskan dapat diterima dan bersaing di dunia kerja dan apa telah disepakati dalam visi dan misi terujud.

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu **stratego** yang artinya ,yaitu semacam ilmunya para jenderal untuk memenangkan pertempuran. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, strategis berasal dari kata majemuk, yang artinya siasat perang, istilah strategi tersebut biasanyadigunakan istilah kemiliteran adalah dalam rangka mencari mencapai kemenangan, sehingga dalam hal ini diperlukan taktik serta



siasat yang baik dan benar.ada beberapa pendapat lain tentang pengertian strategi, antara lain:

1. Strategi didefinisikan sebagai garis besar haluan negara bertindak untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
2. M Arifin memberikan pengertian strategi adalah sebagai segala upaya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu untuk mencapai hasil secara maksimal.
3. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu.(Jurnal Humaira,2005)

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakan di atas, maka penulis perlu kiranya menarik sebuah rumusan masalah supaya penelitian lebih terarah dan mengkerucut, rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini antara lain adalah :

**Apa usaha usaha yang dilakukan oleh Jurusan HTN/JS dalam meningkatkan Mutu**



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Pengebagan Organisasi**

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori teori pengembangan organisasi yang ditulis oleh Sondang P Siagian Tahun 1995, yang dikatakannya bahwa pengembangan organisasi merupakan suatu perubahan organisasi dalam perubahan organisasi dia mengatakan bahwa persepsi tentang perlunya perubahan harus dirasakan karena hanya dalam kondisi demikianlah para anggota organisasi dapat diyakinkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi, diperlukan cara kerja baru, metode kerja baru, dan bahkan mungkin strategi dan visi yang baru.

Salah satu ciri umum pengembangan organisasi adalah bahwa pengembangan organisasi merupakan suatu proses yang terus menerus dan dinamis. Pelaksana harus mampu mengubah strategi selama proses sedang berlangsung sebagai akibat masalah-masalah yang timbul dan kejadian kejadian organisasi. Moekijat (1993:8) mengutip pendapat Gary Dessler mengatakan bahwa ciri umum pengembangan organisasi adalah suatu strategi pendidikan yang dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan organisasi yang telah direncanakan. ( Educare Vol 4, No. 2.tahun 2007)

Ada empat tipe pengembangan organisasi, yakni pengembangan teknologi, pengembangan produk, administratif dan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan teknologi berkenaan dengan proses pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan layanan yang strategis, dan tekologi pendidikan yang dapat menunjang PBM. Sedangkan pengembangan produk adalah berkenaan dengan hasil atau layanan keluaran organisasi dalam proses pendidikan. Lain halnya dengan pengembangan administrasi yakni berkenaan organisasi pendidikan, mencakup struktur, tujuan, kebijakan, insentif, system informasi dan anggaran. Dan yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia adalah pengembangan sikap, keterampilan, pengharapan, kepercayaan, perilaku para pegawai termasuk pimpinan..( Educare Vol 4, No. 2.tahun 2007).

Karena jurusan adalah bagian dari organisasi, maka tak ada salahnya menurut penulis memakai konsep diatas. Strategi itu lazimnya dikaitkan dengan perubahan, sehingga menjadi strategi perubahan. Mengenai strategi mutu pendidikan berarti bagaimana mutu pendidikan itu harus dirubah dengan strategi yang tepat. Mengenai startegi perubagahn itu ditujukan agar organisasi menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka inilah diperlukan usaha untuk merubah organisasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang terkait.( Indrawijaya 1989 : 28) mengemukakan bahwa : “Usaha para manajer untuk memperbaiki atau merubah organisasi pada masa yang lampau lebih banyak dipusatkan pada perubahan : (1) subsistem teknologi; (2) subsistem manajerial; atau (3) subsistem manusia”.

Dari uraian diatas dan disamping itu penelitian ini juga didorong bahwa dengan beberapa kali aktrditasi adalah,B (Berdasarkan SK BAN PT Nomor 1853/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016, berlaku sampai dengan 2 September 2021)Jurusan Jinayah Siyasa, belum bisa meningkatkan status akreditasinta, masih tetap bertahan dengan predikat B, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang strategi yang akan dilakukan oleh jurusan Jinayah siyasa fakultas Syariah UIN IB Padang dalam meningkatkan mutu lulusan dan mewujudkan visi dan misinya

## **B. Teori Kurikulum**

### **a. Pegertian Kurikulum**

Kurikulum, umumnya, diartikan sebagai seperangkat mata pelajaran dan atau materinya yang akan dipelajari, atau yang akan diajarkan guru kepada, siswa. Bagi kebanyakan siswa, kurikulum identik dengan tugas pelajaran, latihan atau isi buku pelajaran. Para orang tua cenderung memaknai kurikulum sebagai latihan pelajaran sekolah atau pekerjaan rumah. Bagi guru, kurikulum seringkali diasosiasikan dengan petunjuk atau pedoman tentang konten kurikulum (materi pelajaran) yang akan diajarkan kepada siswa di samping strategi, metode atau teknik mengajar serta buku sumber materi ajar. Kurikulum juga diartikan berbeda oleh penulis buku pendidikan. Pengertian kurikulum oleh seorang penulis berbeda dengan penulis lain.

Bahkan, seorang penulis buku kurikulum memakai istilah kurikulum untuk pengertian yang berbeda (Brady&Kennedy,2007:4). M.Ansyar

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh.

#### Pengertian Kurikulum

Menurut UU No. 20 Tahun 2003: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

#### b. Fungsi Kurikulum

Salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, sebab kalau satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya

- Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional,
- Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar, guna mencapai tujuan-tujuan itu,

- kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

### c. Landasan Kurikulum

#### 1. landasan Filsafat

Kurikulum yang terdiri atas empat fondasi atau dasar-dasar utama kurikulum yaitu (1) landasan filosofis atau hakekat pengetahuan (*philosophical foundations*), (2) landasan sosiologis atau hakekat masyarakat (*social foundations*), (3) landasan psikologis atau hakekat peserta didik (*psychological foundations*), dan (4) landasan historis (*historical foundations*) memberikan pengaruh yang dominan terhadap konsepsi, teori, arah pengembangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran. Pada dasarnya, filsafat dan kurikulum merupakan varian yang sama untuk menjawab pertanyaan "*what can man become?*" (Zais, 1976:106), atau "*What can a person become?*," dan "*What is the potential of a human being*" serta "Apa hakekat masyarakat" (Morris&Pai,1976:8). Artinya, filsafat memberikan dasar bagi pendidik dan pengembang kurikulum untuk menentukan fondasi yang kuat dalam mendisain kurikulum, menemukan alternatif kurikulum yang tepat, mata pelajaran yang relevan, materi ajar yang serasi, metode yang ampuh, sistem evaluasi yang terpercaya dan arah perbaikan kurikulum yang benar dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang baik

#### 2. landasan Historis

John Dewey menyebut pengetahuan masa lalu itu sebagai kunci keberhasilan pemahaman masa kini (Ornstein&Levine,1984:74). Ini berarti, prestasi pendidikan hari ini merupakan hasil kurikulum masa lalu, sehingga landasan historis perlu menjadi salah satu landasan kurikulum. Karena kebudayaan merupakan refleksi masyarakat, sekolah harus memahami dengan baik ide-ide, tingkah laku dan tradisi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu (Parkay,et.al,2010:49). Artinya, pendidik dan pengembang kurikulum perlu menguasai kompleksitas kekuatan dan pola tingkah laku warga serta tata cara kehidupan masyarakat yang berpengaruh pada pendidikan. Fondasi sosiologis kurikulum

terkait analisis tentang saling kaitan antara individu, masyarakat dan kebudayaan yang terefleksi pada pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dianut warga masyarakat

### 3. landasan Sosiologis

Karena kebudayaan merupakan refleksi masyarakat, sekolah harus memahami dengan baik ide-ide, tingkah laku dan tradisi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu (Parkay, et.al, 2010:49). Artinya, pendidik dan pengembang kurikulum perlu menguasai kompleksitas kekuatan dan pola tingkah laku warga serta tata cara kehidupan masyarakat yang berpengaruh pada pendidikan. Fondasi sosiologis kurikulum terkait analisis tentang saling kaitan antara individu, masyarakat dan kebudayaan yang terefleksi pada pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dianut warga masyarakat bahwa kurikulum merupakan cetak biru (*blue print*) pengembangan individu peserta didik agar mereka menjadi orang yang diinginkan (*what men can become*). Karena itu, pendidik perlu memahami hakekat manusia sebagai dasar bagi penetapan program pendidikan yang tepat dalam memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik menjadi orang yang diinginkan (Zais, 1976:200) sesuai tujuan pendidikan. Artinya, kita harus mengetahui, antara lain, siapakah manusia itu? Bagaimana menjadikan mereka termotivasi berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

### 4. Landasan Psikologis

Bagaimana pula kita memandang peserta didik dalam konteks pendidikan dan lingkungan sekolah. Dari jawaban atas pertanyaan tersebut kita akan bisa menjawab pertanyaan, antara lain: "Apakah peserta didik sebaiknya diperlakukan sebagai subjek pendidikan atau sebagai objek pengajaran?" Psikologi dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut sebab psikologi adalah studi tentang manusia, pembelajar, pembelajaran dan pengajaran (Slavin, 1994:4). Berdasarkan definisi itu, psikologi perlu dijadikan salah satu landasan kurikulum karena melalui psikologi, pendidik memperoleh pengetahuan tentang hakekat individu yang dapat membantu pendidik mengambil keputusan yang cerdas bagi keberhasilan proses pendidikan (Johnson, 1968:39).

#### d. Desain Kurikulum

Disain kurikulum terkait penyusunan empat elemen atau komponen penting kurikulum untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Disain itu melibatkan posisi filsafat, teori dan masalah praktis pengembang kurikulum yang berpengaruh pada interpretasi dan seleksi empat komponen disain kurikulum (Ornstein&Hunkins (2013:151), Keempat komponen disain tersebut ialah: (1) Tujuan (*aims, goals, objectives*), (2) Mata pelajaran, materi ajar, kegiatan belajar atau pengalaman belajar, (3) Organisasi atau susunan mata pelajaran, materi ajar dan kegiatan belajar, dan (4) evaluasi keberhasilan disain. Keempat komponen itu saling terkait dan secara bersama.

### C. Dimensi Horizontal dan Vertikal

Disain kurikulum eksis pada dua dimensi: horizontal dan vertikal. Kedua dimensi itu menetapkan cakupan (*scope*), integrasi (*integration*), keberlanjutan (*continuity*), urutan (*sequence*), artikulasi (*articulation*) dan keseimbangan (*balance*).

#### 1. Dimensi Horizontal

Dimensi horizontal mengacu penyusunan sejajar mata pelajaran atau materi ajar yang mencakup ruang lingkup dan integrasi dua atau lebih mata pelajaran atau konten kurikulum. Umpama, menggabung konten dan kegiatan belajar sejarah, ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi di sekolah menengah ke dalam satu mata pelajaran ilmu sosial merupakan contoh disain horizontal. Mengaitkan konten matematika dan sains atau sains dan astronomi merupakan contoh lain susunan organisasi horizontal.

**Cakupan (*scope*).** Pengembang kurikulum harus menentukan ruang lingkup konten kurikulum pada suatu waktu tertentu. Cakupan berarti keluasan dan kedalaman semua konten kurikulum yang terdiri atas topik, pengalaman belajar. John Goodlad dan Zhinxin Su (1992) mengartikan cakupan sebagai semua tipe pengalaman belajar siswa yang diperolehnya dalam proses pembelajaran yang mencakup pembelajaran kognitif dan afektif dan mungkin juga pembelajaran spiritual (Ornstein&Hunkisn,2013:157) serta pembelajaran psikomotor.



Dapat dipahami bahwa cakupan bisa mengacu pada pengalaman siswa dalam waktu proses pembelajaran selama beberapa minggu, semester atau tahunan. Jika cakupan dalam waktu mingguan atau bulanan, pengalaman belajar itu diorganisir dalam beberapa unit, paket yang bisa terdiri atas pelajaran (*lessons*), topik dan lain-lain (Orstein&Hunkisn,2013:156). Dapat disimpulkan bahwa cakupan berarti batas konten, kegiatan belajar dan pengalaman yang diinginkan tercapai selama waktu tertentu.

**Integrasi.** Tantangan berat dalam penetapan cakupan adalah integrasi pembelajaran yang begitu luas cakupannya pada suatu tingkat pembelajaran tertentu. Secara idea, pengembang kurikulum harus menyadari bahwa pembelajaran akan efektif jika konten suatu bidang studi berkaitan secara berkesinambungan dengan konten bidang studi lain (Orstein&Hunkins,1988;169). Sebab, sangat jarang sutau bidang studi tidak terkait bidang studi lain.

Dengan demikian, integrasi adaklah upaya pendidik untujm membangun hubungan horizonal antar beberapa konten, topik dan tema sehingga siswa memahami saling kaitan antar semua ranah konten, pengetahuan dan pengalaman yang dipelajarinya itu. Sasarannya ialah siswa bisa menguasai pengetahuan scara utuh, bukan terpisah-pisah, sepeti terlihat pada saling kaitan yang ada antar topik atau tema dari semua domain pengetahuan (Ornstein&Hunkins,2013:158). Karena itu, integrasi, menurut Taba (1960), penting berdasarkan fakta kebanyakan kurikulum sekolah terpisah-pisah (*disjointed*), fragmentasi dan segmental sehingga jauh dari kenyataan; kurikulum yang mempresentasi informasi secara terpisah cenderung menghalangi siswa untuk memahami pengetahuan secara utuh dan satu kesatuan (Ornstein&Hunkins,2013:158). Kesimpulan, integrasi ketiga ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada tiap mata pelajaran merupakan contoh integrasi yang baik, sebab hampir pada semua mata pelajaran ketiga ranah itu diajarkan atau dipelajari siswa terpisah-pisah. Malahan ada mata pelajarn yang hanya fokus pada satu atau dua ranah saja tanpa integrasi, sehingga tidak pernah terbentuk satu kesauan pengetahuan yang integral dengan dua ranah lain.

## 2. Dimensi Vertikal

Dimensi vertikal yang mencakup urutan (*sequence*) dan keberlanjutan (*continuity*), mengacu susunan longitudinal beberapa mata pelajaran dan materi ajarnya.

**Urutan (*sequence*).** Urutan mengacu pada upaya mengatur (*ordering*) komponen kurikulum untuk membuahkan efek pembelajaran yang akumultaif dan berkelanjutan (Oliva,1982:468; Ornstein&Hunkins,2013:156). Mengajarkan “famili” pada pelajaran ilmu sosial di kelas I Sekolah Dasar dan ”masyarakat” di kelas II ilmu sosial adalah contoh penyusunan vertikal (Ornstein&Hunkins,2013:155). Seringkali kurikulum diorganisir agar topik yang sama diajarkan pada beberapa tingkat kelas tetapi dengan lebih rinci dan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Misalnya, mengajarkan *past tense* dalam bahasa Inggris sebagai penunjuk waktu kegiatan atau perbuatan di kelas bawah sekolah menengah, di kelas yang berikut diajarkan *tense* tidak selalu mengacu pada waktu tetapi sebagai penunjuk konsep.

Ada beberapa cara yang ditempuh untuk menentukan urutan konten; apa yang diajarkan dahulu dan berikutnya.: (1) dari konten sederhana (mudah) ke yang kompleks (sukar); pembelajaran bisa optimal jika dimulai dari sub-komponen konten ke yang lebih mudah ke yang kompleks/sukar; (2) dari umum ke khusus dan sebaliknya; (3) *prerequisite learning* , siswa sukar mempelajari konten baru tanpa menguasai konten sebelumnya; (3) urutan kronologis atau urutan kronologis terbalik, tentang konten terkait urutan waktu; (4) yang dekat ke yang jauh (secara geografis) atau sebaliknya, (4) dari yang konkrit ke abstrak, (5) (Oliva1982:469-70;Ornstein&Hunkins,2013:157).

Posner dan Strike (1976) mengajukan empat tipe urutan: (1) *concept related*, terkait struktur pengetahuan yang fokus pada saling kaitan antar konsep dari pada pengetahuan yang konkrit; (2) *inquiry related*, topik diurut untuk merefleksikan langkah ilmuwan dalam penelitian ilmiah; (3) *learning-related* , terkait urutan siswa memahami konten melalui pengalamannya mempelajari konten dan kegiatan belajar, dan (4) *utilization-related* fokus bagaimana urutan orang yang memakai

oenegetahaun melalui kegiatan yang dilakukannya (Ornstein&Hunkins,2013:157).

***Keberlanjutan (Continuity).*** Keberlanjutan menagcu ada pengulangan pengajaran monten pada bebebra tingkat lebih tuinggi, pada tiap tingkat konten yang diajarkan lebih komlkes dari sebelumnya dengna sasaran agar pengethauan ynagsana akan dipakai pada tingkatg yang lebih tinggi atau watu berikutnya untuk mewmeksimlkan pemhaman siswa (Oliva,1982:472; Ornstein&Hunkins,2013:157). Contoh, untuk menjadi pembaca yang baik siswa perlu menguasai beberapa tipe materi bacaan sehingga ketiika tipe itu ditemui di waktu lain, bahan itu muah dipahami siswa.

***Artikulasi (Articulation) dan Balans (Balance).*** Artikulasi mengacu pada saling kaitan beberapa aspek kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga konten yang muncul kemudian berkaitan dengan yang sebelum itu. Misalnya, guru mengatur agar mata pelajaran matematika berkaitan dengan konsep kunci matematika pada mata pelajaran geometri di waktu lain (Ornstein&Hunkins,2013:158). Berdasarkan itu, artikulasi vertikal menunjukkan hubungan suatu aspek urutan kurikulum dengan pelajaran, topik, atau mata pelajaran yang muncul kemudian dalam urutan program. Artikulasi itu memungkinkan siswa menguasai konsep yang diperlukan untuk menguasai konsep konten di tuingkat berikutnya (Ornstein&Hunkins,2013:158). .

Artikulasi horizontal (biasa disebut korelasi) terkait asosiasi antara atau antar beberapa elemen kurikulum pada saat bersamaan, seperti guru yang mengembangkan pemahaman siswa tentang saling kaitan antara ilmu sosial dan bahasa Inggris di kelas delapan SD (Ornstein&Hunkins,2013:158). Artinya, artikulasi horizontal menginginkan agar ada hubungan antara konsep matematika dan berpikir kritis. Menurut Ornstein&Hunkins (2013:158), banyak tekanan dilakukan untuk mengintegrasikan kurikulum melalui artikulasi horizontal.

***Spiral Curriculum.*** Kedua dimensi disain sesuai ide Dewey tentang *spiral curriculum* untuk memperdalam pengalaman siswa ke tingkat yang makin tinggi (melalui organisasi vertikal) dan memperluas (melalui organisasi

horizontal) pembelajaran siswa sesuai tingkat perkembangan siswa. Hal ini, menurut Dewey, bukan saja meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu disiplin ilmu atau mata pelajaran, tetapi juga memberikan pemahaman lebih baik tentang masalah kehidupan masyarakat. Hal ini, lanjut Dewey, mensyaratkan *curriculum synthesis* pada kedua dimensi: dimensi vertikal terhadap ekstensi pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi, dan dimensi horizontal pada saling kaitan antar ilmu pengetahuan (Tanner&Tanner,1975:430).

Konsep kurikulum spiral Dewey bukan saja menghasilkan integrasi vertikal pengetahuan (*deepening of knowledge*), tetapi juga menimbulkan perluasan pengetahuan (*widening of knowledge*). Artinya, ketika pendidik menghubungkan beberapa mata pelajaran, bidang studi atau disiplin ilmu yang berbeda, sebenarnya ia membangun organisasi horizontal kurikulum. Dan ketika ia mengembangkan koherensi dan kontinuitas pengetahuan dalam suatu disiplin atau bidang studi, ia menyusun organisasi vertikal.

Dalam membangun dimensi horizontal dan vertikal, independensi masing-masing mata pelajaran, bidang studi atau disiplin ilmu, bisa saja tetap terpelihara, tetapi bisa juga batas antar bidang studi itu menjadi kabur atau hilang sama sekali. Jika batas antara bidang studi hilang, berarti telah terbentuk kurikulum sintesis (Tanner&Tanner, 1975:473) sebagai hasil kedua dimensi horizontal dan vertikal kurikulum. Kurikulum, umumnya, diartikan sebagai seperangkat mata pelajaran dan atau materinya yang akan dipelajari, atau yang akan diajarkan guru kepada, siswa. Bagi kebanyakan siswa, kurikulum identik dengan tugas pelajaran, latihan atau isi buku pelajaran. Para orang tua cenderung memaknai kurikulum sebagai latihan pelajaran sekolah atau pekerjaan rumah. Bagi guru, kurikulum seringkali diasosiasikan dengan petunjuk atau pedoman tentang konten kurikulum (materi pelajaran) yang akan diajarkan kepada siswa di samping strategi, metode atau teknik mengajar serta buku sumber materi ajar. Kurikulum juga diartikan berbeda oleh penulis buku pendidikan.

Dari uraian diatas dan disamping itu penelitian ini juga didorong bahwa dengan beberapa kali aktrditasi adalah,B (Berdasarkan SK BAN PT Nomor 1853/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2016, berlaku sampai dengan 2 September 2021) Jurusan Jinayah Siyasah, belum bisa meningkatkan status akreditasinya, masih tetap bertahan dengan predikat B, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang strategi yang akan dilakukan oleh jurusan Jinayah siyasah fakultas Syariah UIN IB Padang dalam meningkatkan mutu lulusan dan mewujudkan visi dan misinya



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif, yaitu Peneliti menggali informasi, terkait objek yang dikaji melalui wawancara dengan stakeholder. Dan Ketua dan sektearis Jurusan, dosen, mahasiswa pegawai Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. (Lexy J. Moleong, 2004)

### **B. Metode Pendekatan**

Ada dua metode pendekatan disini yakni, *pendekatan historis*, yakni terkait dengan sejarah berdiri dan lahirnya Jurusan Jinayah Siyasa, serta kendala dan hambatan yang ditemui., sedangkan pendekatan dalam pengembangan jurusan Jinayah Siyasa. Dan yang kedua adalah pendekatan *juridis-normatif*, yakni melacak berdasarkan peraturan perundang undanag dan dokumen- dokumen yang terkait tentang srtegi dalam pengembangan prody/jurusan Jinayah Siyasa/HTN .

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta angket. Instrumen.

Wawancara atau *interview* dilakukan dengan cara terbuka (*overt*) dan tidak tertutup (*convert*). Sifat pertanyaan tidak terstruktur (*unstructured interview*), dan menekankan pada pendalaman (*probing*) yang terkait dengan kasus saja. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam, mendetail atau intensif tentang upaya menemukan pengalaman-pengalaman informan atau responden dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. (Sutopo H.B, 1999). Dokumentasi, dokumentasi

berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

#### **D. Pengelolaan Data**

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya pengantar penelitian hukum, tahun 1984, hal 201 dalam penelitian tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi **pustaka**/dukument, **pengamatan** / observasi, dan wawancara/ interview. Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi lapangan atau *field research* yaitu pengumpulan data melalui hasil observasi ,dan **wawancara**



## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Jurusan HTN/JS dalam pengembangan jurusan, di antaranya adalah:

1. Perubahan/Pengembangan Kurikulum
2. .Membuat Group Jinayah Siyasa/HTN di media Masa( Facebook)
3. Membentuk ikatan Alumni JS/HTN
4. Ikut Dalam Asosiasi Jurusan JS/HTN seluruh Indonesia
5. Membuat buku monitoring mahasiswa
6. Membuat Mou dengan prodi HTN lain

Sebelum masuk pada strategi yang dilakukan oleh jurusan HTN/JS dalam pengembangan jurusan, terlebih dahulu akan digambarkan tentang kurikulum yang berlakusaat ini, saat ini jurusan HTN/ JS mempunyai 4 kurikulum yang berlaku, kurikulum 12, kurikulum 16, kurikulum 2017, dan kurikulum 2018, sebagai beirikum

#### Kurikulum

#### JURUSAN JINAYAH SIYASAH

TAHUN 2012

---

---

#### **A. Mata Kuliah Komponen Institut**

<b>No.</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	Ulumul Qur'an	2
2	Ulumul Hadis	2
3	Ilmu Tauhid	2
4	Akhlak Tasauf	2
5	Ushul Fikih I	2
6	Sejarah dan Peradaban Islam	2

7	Pancasila	2
8	Kewarganegaraan	2
9	Bahasa Arab I	3
10	Bahasa Inggris I	2
11	Bahasa Indonesia	2
12	Metodologi Studi Islam	2
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>

### **B. Mata Kuliah Komponen Fakultas**

<b>No.</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
01.	Ushul Fiqh II	2
02.	Bahasa Arab II	3
03.	Bahasa Arab III	2
04.	Bahasa Inggris II	2
05.	Fikih Ibadah	2
06.	Fikih Muamalat	2
07.	Fikih Munakahat	2
08.	Fikih Mawaris	2
09.	Fikih Siyasah	2
10.	Fikih Jinayah	2
11.	Kaidah-Kaidah Fikih	2
12.	Tarikh Tasyri'	2
13.	Fikih Kontemporer	2
14.	Pengantar Ilmu Hukum	2
15.	Pengantar Hukum di Indonesia	2
16.	Hukum Perdata	2
17.	Hukum Pidana	3
18.	Hukum Tata Negara	2
19.	Hukum Adat	2
20.	Sosiologi Hukum	2
21.	Hukum Acara Perdata	2
22.	Hukum Acara Pidana	3
23.	Filsafat Hukum	2

24	Filsafat Hukum Islam	2
25	Sejarah Peradilan Islam	2
26	Peradilan Agama di Indonesia	2
27	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
28	Hukum Acara Peradilan Agama	2
29	Metodologi Penelitian	2
30	Metode Penelitian Hukum	2
31	Ilmu Mantiq	2
32	Ilmu Falak I	2
33	Ekonomi Islam	2
34	Lembaga Keuangan Syari'ah	2
35	Praktek Peradilan Agama	2
36	Kuliah Kerja Nyata	4
37	Skripsi	4
38	Praktikum Qiraat	0
39	Praktikum Ibadah	0
40	Praktikum Khutbah/Dakwah	0
41	Praktikum Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	0
	<b>Jumlah</b>	<b>81</b>

### C. Mata Kuliah Komponen Jurusan

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Tafsir Ahkam	2
2	Hadis Ahkam	2
3	Ilmu Negara	2
4	Pemikiran Politik Islam	2
5	Fiqh Jinayah II	2
6	Hukum Administrasi Negara	2
7	Tafsir Ahkam ttg Jinayah dan Siyasah	2
8	Hadits Ahkam ttg Jinayah dan Siyasah	2

9	Ilmu Politik I (Pengantar Ilmu Politik)	2
10	Ilmu Politik II (Teori Politik)	2
11	Hukum Internasional	2
12	Kriminologi	2
13	Politik Islam di Indonesia	2
14	Politik Hukum Islam di Indonesia	2
15	Perkembangan Pemikiran Politik Islam Moderen	2
16	Hukum Pidana Khusus	2
17	Perkembangan Hukum Pidana Islam di Indonesia	2
18	Bantuan Hukum dan Kebijakan Publik	2
19	Membahas Kitab Standar	2
20	Metode Ijtihad/Al-Fatawa	2
21	Legal Drafting	2
22	Lembaga-Lembaga Negara	2
23	Perbandingan Hukum Pidana (Pilihan)	2
24	Sosiologi Politik (Pilihan)	2
25	Ilmu Falak II (Pilihan)	2
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>

**Total SKS = 156**

Mata Kuliah Pilihan :

<b>N0</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	Ilmu Falak II	2
2	Perbandingan Hukum Pidana	2
3	Sosiologi Politik	2
4	Hak Asasi Manusia	2
5	Hukum Konstitusi	2
6	Hukum Pidana Internasional	2

**KOMPETENSI PENGEMBANGAN MATA KULIAH  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)**

<b>No.</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	Ilmu Tauhid	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	Akhlak/Tasauf	2
4	Ulumul Qur'an	2
5	Ulumul Hadis	2
6	Pancasila	2
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>

**B. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)**

<b>No.</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	Metodologi Studi Islam	2
2	Bahasa Indonesia	2

3	Bahasa Inggris I	2
4	Bahasa Inggris II	2
5	Bahasa Arab I	3
6	Bahasa Arab II	3
7	Bahasa Arab III	2
8	Sejarah Peradaban Islam	2
9	Ushul Fiqh I	2
10	Ushul Fiqh II	2
11	Pengantar Ilmu Hukum	2
12	Tarekh Tasyri'	2
13	Fiqh Ibadah	2
14	Pengantar Hukum Indonesia	2
15	Ilmu Mantiq	2
16	Sejarah Peradilan Islam	2
17	Fiqh Munakahat	2
18	Ilmu Negara	2
19	Metodologi Penelitian	2
20	Hukum Perdata	2
21	Hukum Pidana	3
22	Fiqh Mawaris	2
23	Hukum Tata Negara	2
24	Filsafat Hukum	2
25	Fiqh Mu'amalat	2
26	Fiqh Siyasah	2

27	Pemikiran Politik Islam	2
28	Fikih Jinayah I	2
29	Fikih Jinayah II	2
30	Kaidah-Kaidah Fikih	2
31	Tafsir Ahkam	2
32	Hadis Ahkam	2
33	Hukum Administrasi Negara	2
34	Filsafat Hukum Islam	2
35	Ilmu Politik I (Pengantar Ilmu Politik)	2
36	Ilmu Politik II (Teori Politik)	2
37	Peradilan Agama di Indonesia	2
38	Hukum Internasional	2
39	Kriminologi	2
40	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
41	Lembaga Keuangan Syari'ah	2
42	Hukum Adat	2
43	Tafsir Ahkam fil Jinayah wal Siyasah	2
44	Hadis Ahkam fil Jinayah wal Siyasah	2
45	Metode Ijtihad	2
46	Fikih Kontemporer	2
47	Perbandingan Hukum Pidana	2
48	Politik Hukum Islam di Indonesia	2
49	Perkembangan Pemikiran Politik Islam Moderen	2

50	Hukum Pidana Khusus	2
51	Ekonomi Islam	2
52	Politik Islam di Indonesia	2
53	Perkembangan Hukum Pidana Islam di Indonesia	2
		<b>109</b>

### C. Mata Kuliah Keahlian Berkarya MKB)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Ilmu Falak I & II	4
2	Bantuan Hukum dan Kebijakan Publik	2
3	Membahas Kitab Standar	2
4	Legal Drafting	2
5	Hukum Acara Peradilan Agama	2
5	Hukum Acara Perdata	2
6	Hukum Acara Pidana	3
7	Praktikum Dakwah	0
8	Magang	0
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>

### D. Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Metode Penelitian Hukum	2



2	Skripsi	4
3	Praktikum Qira'ah	0
4	Praktikum Ibadah	0
5	Praktikum Haji	0
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

### **E. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)**

<b>No.</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	Sosiologi Hukum	2
2	Sosiologi Politik	2
3	Praktek Peradilan	2
4	Kuliah Kerja Nyata	6
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>
	<b>T o t a l   S K S</b>	<b>156</b>

Sebaran Mata Kuliah  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

### **SEMESTER I**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
01	111103020001	Pancasila	2
02	111103020002	Akhlak-Tasawuf	2
03	111203020003	Metodologi Studi Islam	2

04	113203020004	Bahasa Inggris I	2
05	113203020005	Bahasa Arab I	3
06	113203020006	Bahasa Indonesia	2
07	121203020007	Pengantar Ilmu Hukum	2
08	123203020008	Fiqh Ibadah	2
09	111103020009	Ulumul Qur'an	2
<b>Jumlah</b>			<b>19</b>

## SEMESTER II

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
01	211103020001	Kewarganegaraan	2
02	211103020002	Ilmu Tauhid	2
03	221203020003	Pengantar Hukum di Indonesia	2
04	221203020004	Fiqh Mu'amalah	2
05	211203020005	Sejarah dan Peradaban Islam	2
06	223203020006	Bahasa Inggris II	2
07	223203020007	Bahasa Arab II	3
08	211103020008	Ulumul Hadits	2
09	221203020009	Tarikh Tasyri'	2
10	MPB	Praktikum Qira'ah	0
<b>Jumlah</b>			<b>19</b>

**SEMESTER III**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
01	323203020001	Ilmu Mantiq	2
02	323303020002	Ilmu Falak I	2
03	323203020003	Bahasa Arab III	2
04	321203020004	Fiqh Munakahat	2
05	321203020005	Tafsir Ahkam	2
06	321203020006	Sejarah Peradilan Islam	2
07	321203020007	Hadits Ahkam	2
08	323203020008	Fiqh Mawaris	2
09	321203020009	Ilmu Negara	2
10	311203020010	Ushul Fiqh I	2
11	321203020011	Hukum Perdata	2
	MKB	Praktikum Ibadah	<b>0</b>
		<b>Jumlah</b>	<b>22</b>

**SEMESTER IV**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
01	421203020001	Metodologi Penelitian	2
02	421203020002	Hukum Pidana	3
03	421203020003	Kaidah-kaidah Fikih	2
04	421203020004	Ushul Fiqh II	2
05	421203020005	Hukum Tata Negara	2
06	422303020006	Ilmu Falak II	2

07	421203020007	Fiqh Siyasah	2
08	421203020008	Fiqh Jinayah I	2
09	421203020009	Ilmu Politik I	2
10	422303020010	Membahas Kitab Standar	2
11	421203020011	Fikih Kontemporer	2
	MKB	Praktikum Khutbah/Dakwah	0
		Jumlah	23

### **SEMESTER V**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
01	522403020001	Metode Penelitian Hukum	2
02	521203020002	Hukum Administrasi Negara	2
03	521203020003	Ekonomi Islam	2
04	522303020004	Legal Drafting	2
05	521203020005	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
06	521203020006	Ilmu Politik II	2
07	521203020007	Pemikiran Politik Islam	2
08	521203020008	Fiqh Jinayah II	2
09	521203020009	Peradilan Agama di Indonesia	2
10	521203020010	Hukum Internasional	2
11	521203020011	Kriminologi	2

12	MPB	Praktikum TIK	0
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>

### **SEMESTER VI**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
01	621203020001	Filsafat Hukum	2
02	621203020002	Hukum Adat	2
03	621203020003	Tafsir Ahkam ttg Jinayah dan Siyasah	2
04	621203020004	Hadis Ahkam ttg Jinayah dan Siyasah	2
05	621203020005	Al-Fatwa/Metode Ijtihad	2
06	621303020006	Bantuan Hukum dan Kebijakan Publik	2
07	621303020007	Hukum Acara Peradilan Agama	2
08	621203020008	Perkm. Politik Islam di Indonesia	2
09	621303020009	Hukum Acara Pidana	3
10	621303020010	Hukum Acara Perdata	2
11	621203020011	Lembaga Keuangan Syari'ah	2
<b>Jumlah</b>			<b>23</b>

**SEMESTER VII**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
01	721203020001	Politik Islam di Indonesia	2
02	721203020002	Perbandingan Hukum Pidana	2
03	721203020003	Politik Hukum Islam di Indonesia	2
04	721203020004	Perkembangan Pemikiran Politik Islam Moderen	2
05	721203020005	Filsafat Hukum Islam	2
06	721503020006	Sosiologi Hukum	2
07	721203020007	Hukum Pidana Khusus	2
08	721503020008	Sosiologi Politik	2
09	721203020009	Perkembangan Hukum Pidana Islam di Indonesia	2
10	MKB	Magang	0
<b>Jumlah</b>			<b>18</b>

**SEMESTER VIII**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
01	822503020001	Praktek Peradilan	2
02	822503020002	Kuliah Kerja Nyata	4
03	822403020003	Skripsi	4
		Jumlah	<b>10</b>

Padang, 2 Desember 2012  
Ketua Jurusan Jinayah Siyasah  
Fak. Syari'ah IAIN IB Padang

Azhariah Khalida, M. Ag

### Kurikulum Jinayah Siyasah Tahun 2016

#### **Profil Lulusan Jurusan Jinayah Siyasah**

a. Visi

Jurusan Jinayah Siyasah adalah Menjadi Pusat Pengembangan Keilmuan Pidana dan Ketatanegaraan Islam Tahun 2030.

b. Misi

Misi Jurusan Jinayah Siyasah adalah:

1. Melaksanakan pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum pidana dan ketatanegaraan Islam;
2. Meningkatkan kompetensi dan keunggulan sumberdaya manusia dalam penegakan hukum dan keadilan;
3. Menyiapkan sumberdaya lulusan yang mampu menjadi insiator dalam mengadvokasi kebijakan publik;

c. Profil Lulusan

Profil lulusan Jurusan Jinayah Siyasah diharapkan akan menjadi:

1. Hakim
2. Advokat
3. Konsultan
4. Analis
5. Legal Drafter

## 2. Tujuan Jurusan Jinayah Siyash

Penyelenggaraan pendidikan pada Jurusan Jinayah Siyash bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan lulusan yang memahami hukum Islam dengan spesifikasi kajian Jinayah dan Siyash secara komprehensif dengan pemahaman yang orisinal, kritis, ilmiah, historis dan rasional, yang responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta akibat yang ditimbulkannya.
- b. Menghasilkan lulusan yang aktif dan dapat memberikan kontribusi terhadap negara dan bangsa dalam rangka pembentukan dan reformasi hukum di Indonesia ( Borang Akreditasi JS Th 2016

### Semester I

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	11101	PANCASILA	2
2	11102	BAHASA INDONESIA	2
3	11103	BAHASA INGGRIS	2
4	11104	BAHASA ARAB ISTIMA` WA TAKALLUM	2
5	11105	PENGANTAR STUDI QUR`AN DAN HADITS	2
6	11106	PENGANTAR STUDI HUKUM ISLAM	2
7	11107	PENGANTAR STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM	2
8	11108	PENGANTAR STUDI PEMIKIRAN ISLAM	2



9	121020009	PENGANTAR ILMU HUKUM	2
10	121020010	FIKIH IBADAH	2
<b>JUMLAH</b>			<b>20</b>

## Semester II

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	21101	KEWARGANEGARAAN	2
2	221020002	HADITS HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN	2
3	221020003	FIKIH JINAYAH	2
4	223020004	BAHASA ARAB QIRAAH WA KITABAH	2
5	221020005	TARIKH TASYRI	2
6	222020006	PENGANTAR USHUL FIKIH	2
7	221020007	FIQH SIYASAH	2
8	221020008	ILMU NEGARA	2
9	221020009	PENGANTAR HUKUM DI INDONESIA	2
10	222020010	FIKIH IBADAH PRAKTIS	2
11	223020011	READING TEKS ON ISLAMIC LAW	2

12	-	PRAKTIKUM QIRA`AH	0
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester III

No		Mata Kuliah	SKS
1	31101	FILSAFAT ILMU	2
2	321020002	JARIMAH HUDUD	2
3	321020003	PEMIKIRAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM	2
4	321020004	FIQH MUNAKAHAT	3
5	321020005	METODOLOGI ISTINBATH HUKUM ISLAM	2
6	321020006	ILMU MANTIK	2
7	323020007	PENGANTAR ILMU SOSIAL	2
8	321020008	HUKUM PERDATA	2
9	321020009	HUKUM PIDANA	2
10	321020010	AKHLAK	2
11	321020011	FIKIH MUAMALAH	2
<b>JUMLAH</b>			<b>23</b>

**Semester IV**

<b>No</b>	<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	41101	ISLAM DAN ADAT MINANG KABAU	2
2	41302	METODOLOGI PENELITIAN	2
3	421020003	JARIMAH QISHASH DAN TA'ZIR	2
4	422020004	MEMBAHAS KITAB STANDAR	2
5	421020005	HUKUM KEUANGAN NEGARA DALAM ISLAM	2
6	421020006	HUKUM PERUNDANG- UNDANGAN ISLAM	2
7	421020007	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	2
8	421020008	FIQH MAWARIS	3
9	421020009	PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	2
10	421020010	HUKUM TATA NEGARA	2
11	421020011	ILMU FALAK	2
12	-	PRAKTEK DAKWAH DAN KUTBAH	0
<b>JUMLAH</b>			<b>23</b>

**Semester V**

<b>No</b>	<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	521020001	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2
2	521020002	HUKUM INTERNASIONAL DAN HUMANITER DALAM ISLAM	2
3	521020003	HUKUM ACARA PERADILAN TUN	2
4	521020004	HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	2
5	523020005	METODE PENELITIAN HUKUM	2
6	521020006	HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA	2
7	521020007	METODE PEMAHAMAN TEKS DALAM USHUL FIKIH	2
8	521020008	HUKUM PERWAKAFAN	2
9	521020009	HUKUM ACARA PERDATA	2
10	521020010	HUKUM ACARA PIDANA	2
11	521020011	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	2
12	-	PRAKTIKUM PERADILAN SEMU	0

<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>
---------------	-----------

### Semester VI

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	621020001	KAIDAH-KAIDAH FIQH	2
2	621020002	HUKUM AGRARIA	2
3	621020003	FILSAFAT HUKUM PIDANA ISLAM	2
4	621020004	HUKUM INTERNASIONAL	2
5	621020005	TAFSIR AHKAM	2
6	622020006	SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN	2
7	621020007	ETIKA PROFESI HUKUM	2
8	621020008	EKONOMI ISLAM	2
9	622020009	PRAKTEK PERADILAN AGAMA	2
10	61210	KKN	4
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester VII

No		Mata Kuliah	SKS
1	721020001	POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA	2

2	721020002	PERBANDINGAN HUKUM PIDANA	2
3	721020003	TEORI DAN PRAKTEK BANTUAN HUKUM	2
4	721020004	HUKUM PIDANA KHUSUS	2
5	721020005	SOSIOLOGI HUKUM	2
6	721020006	HUKUM ADAT	2
7	722020007	KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN ISLAM	2
<b>JUMLAH</b>			<b>14</b>

### Semester VIII

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Sks
1	11101	Skripsi	4
<b>Jumlah</b>			<b>4</b>

### Total Beban SKS

No	Semester	Beban SKS
1	I	20
2	II	22
3	III	23
4	IV	23
5	V	22

6	VI	22
7	VII	14
8	VIII	4
<b>Total</b>		<b>150</b>

**KURIKULUM KKNJ JURUSAN HUKUM TATA  
NEGARA ISLAM  
TAHUN 2017/2018**

**Semester I**

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1000205	Pancasila	2
2	1000207	Bahasa Indonesia	2
3	1000209	Bahasa Inggris	2
4	1000208	Bahasa Arab Istima' wa Takallum	2
5	1000201	Pengantar Studi Qur'an dan Hadits	2
6	1000203	Pengantar Studi Hukum Islam	2
7	1303101	Ilmu Negara	2
8	1303102	Sejarah Hukum Ketatanegaraan Islam	2
9	1303103	Pengantar Ilmu Hukum	2
10	1303104	Sejarah Pemikiran Hukum Islam	2
11	1303105	Fikih Ibadah	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

## Semester II

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1000206	Kewarganegaraan	2
2	1300208	Bahasa Arab Qiraah wa Kitabah	2
3	1300204	Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam	2
4	1000202	Pengantar Studi Pemikiran Islam	2
5	1303106	Pengantar Ushul Fikih	2
6	1303107	Hukum Ketatanegaraan Islam	2
7	1303108	Akhlak	2
8	1303109	Pengantar Hukum Indonesia	2
9	1303110	Reading Teks on Islamic Law	2
10	1303111	Fikih Amali	2
11	1303112	Ilmu Falak	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

## Semester III

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1000210	Filsafat Ilmu	2
2	1303113	Fikih Muamalah	2
3	1303114	Hukum Perdata	2
4	1303115	Hukum Tata Negara	2
5	1303116	Hukum Pidana	2
6	1303117	Fikih Munakahat	2
7	1303118	Adillatul Ahkam / Dalil-Dalil Hukum Islam	2
8	1303119	Fikih Mawaris	2
9	1303120	Fikih Jinayah	2
10	1303121	Hukum Administrasi Negara	2
11	1303122	Dasar-Dasar Hukum	2



		Ketatanegaraan Islam	
		<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>

### Semester IV

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1000211	Metodologi Penelitian	2
2	1000212	Islam dan Budaya Minangkabau	2
3	1303123	Hukum Perwakafan	2
4	1303124	Hukum Internasional	2
5	1303125	Hukum Keuangan Islam	2
6	1303126	Ilmu Mantik	2
7	1303127	Hukum Perundang-Undangan Islam	2
8	1303128	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
9	1303129	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	2
10	1303130	Studi Naskah Fikih	2
11	1303131	Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	2
		<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>

### Semester V

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1303132	Hukum Humaniter	2
2	1303301	Hukum Pajak	2
3	1303133	Hukum Agraria	2
4	1303134	Hukum Acara Peradilan Agama	2
5	1303135	Hukum Acara Perdata	2

6	1303136	Hukum Acara Pidana	2
7	1303137	Perancangan Peraturan PerUndang-Undangan	2
8	1303138	Metode Penelitian Hukum	2
9	1303139	Lembaga Negara	2
10	1303140	Hukum Konstitusi	2
11	1303141	Studi Naskah Fiqih	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester VI

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1303142	Politik dan Demokrasi	2
2	1303143	Politik Hukum	2
3	1303144	Kaidah Fikih	2
4	1303302	Hukum HAM	2
5	1303145	Filsafat Hukum Islam	2
6	1303146	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
7	1303147	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
8	1303303	Retorika Hukum	2
9	1303304	Kepaniteraan	2
10	1303148	Praktek Peradilan Agama	2
11	1303149	Hukum Adat	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester VII

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	15403150	Sosiologi Hukum	2
2	1303151	Etika Profesi Hukum	2

3	1303152	Teori dan Praktek Bantuan Hukum	2
4	1303305	Pemilu dan Partai Politik	2
5	1303153	Kapita Seleakta Hukum Tata Negara	2
<b>JUMLAH</b>			<b>10</b>

### **Semester VIII**

<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	1000213	KKN	4
2	1000214	Skripsi	4
<b>JUMLAH</b>			<b>8</b>

## **KURIKULUM KKNi HTN 2018**

### **Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Profil Lulusan**

<b>NO</b>	<b>Profil</b>	<b>Mata Kuliah</b>
<b>1</b>	Praktisi Hukum	Hukum Acara Peradilan Agama Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum perdata Islam di Indonesia Hukum agraria Fikih jinayah Fikih muamalah Fikih munakahat Etika profesi hukum Teori dan praktek bantuan hukum

NO	Profil	Mata Kuliah
		Ilmu falak Peradilan agama di indonesia Hukum perwakafan Ekonomi Islam Fikih mawaris Hukum pajak Kaidah Fikih Kepaniteraan
2	Ahli Hukum Tata Negara	Pengantar Hukum Ketatanegaraan Islam Ilmu negara Fikih Siyasah Akhlak Tafsir Ayat-Ayat Ketatanegaraan Hadis tentang ketatanegaraan Pengantar Ushul Fikih Hukum administrasi negara Hukum Tata negara Hukum konstitusi Pengantar Ilmu Hukum Pengantar hukum di indonesia Hukum keuangan dalam Islam Pemikiran ketatanegaraan dalam Islam Hukum Internasional Etika profesi hukum Ilmu Mantik Kaidah Fikih Filsafat Hukum Islam
3	Legal Drafter	Perancangan peraturan perundang-undangan Pengantar ilmu hukum Pengantar hukum indonesia Hukum perundang-undangan Islam Ilmu Negara Hukum Tata Negara

<b>NO</b>	<b>Profil</b>	<b>Mata Kuliah</b>
		Etika profesi hokum
<b>4.</b>	Asisten Peneliti Hukum	Metodologi Penelitian Metode penelitian Hukum Metodologi Istimbath Hukum Islam Studi Naskah Dasar-Dasar Ilmu Sosial Sosiologi Hukum Etika profesi hokum Teori dan praktek bantuan hukum Ilmu falak Fikih muamalah Peradilan agama di indonesia Hukum perwakafan Hukum perdata Islam di Indonesia Ekonomi Islam Pemikiran Hukum Islam Kontenporer Reading teks on Islamic Law Sejarah Pemikiran Hukum Islam

### **Distribusi Mata Kuliah Per Semester**

#### **Semester I**

<b>No</b>	<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	1000205	Pancasila	2
2	1000207	Bahasa Indonesia	2
3	1000209	Bahasa Inggris	2
4	1000208	Bahasa Arab	2
5	1000201	Pengantar Studi Qur'an	2

		dan Hadits	
6	1000203	Pengantar Studi Hukum Islam	2
7	1303145	Ilmu Negara	2
8	1303134	Sejarah Hukum Ketatanegaraan Islam	2
9	1303104	Pengantar Ilmu Hukum	2
10	1303103	Sejarah Pemikiran Hukum Islam	2
11	1303129	Fikih Ibadah	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

## Semester II

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1000206	Kewarganegaraan	2
2	1303105	Bahasa Arab Qiraah wa Kitabah	2
3	1000204	Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam	2
4	1000202	Pengantar Studi Pemikiran Islam	2
5	1303139	Pengantar Ushul Fikih	2
6	1303138	Hukum Ketatanegaraan Islam	2
7	1303101	Akhlak	2
8	1303106	Pengantar Hukum	2

		Indonesia	
9	1303107	Reading Teks on Islamic Law	2
10	130311	Ilmu Falak	2
11		Fikih Amali	0
<b>JUMLAH</b>			<b>20</b>

### Semester III

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1000210	Filsafat Ilmu	2
2	1303141	Fikih Muamalah	2
3	1303112	Hukum Perdata	2
4	1303117	Hukum Tata Negara	2
5	1303121	Hukum Pidana	2
6	1303128	Fikih Munakahat	2
7	1303109	Sumber dan Dalil Hukum Islam	2
8	1303136	Fikih Mawaris	2
9	1303132	Fikih Jinayah	2
10	1303130	Hukum Administrasi Negara	2
11	1303142	Dasar-Dasar Hukum Ketatanegaraan Islam	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

## Semester IV

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1000211	Metodologi Penelitian	2
2	1000212	Islam dan Budaya Minangkabau	2
3	1303131	Fikih Wakaf	2
4	1303140	Hukum Internasional	2
5	1303354	Hukum Keuangan Islam	2
6	1303102	Ilmu Mantik	2
7	1303144	Hukum Perundang-Undangan Islam	2
8	1303124	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
9	1303101	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	2
10	1303143	Fikih Zakat	2
11	1303108	Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

## Semester V

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1303355	Hukum Humaniter	2
2	1303355	Hukum Pajak	2
3	1303127	Hukum Agraria	2



4	1303116	Hukum Acara Peradilan Agama	2
5	1303115	Hukum Acara Perdata	2
6	1303128	Hukum Acara Pidana	2
7	1303148	Perancangan Peraturan PerUndang-Undangan	2
8	1303119	Metode Penelitian Hukum	2
9	1303149	Lembaga Negara	2
10	1303150	Hukum Konstitusi	2
11	1303114	Metode Istimbat Hukum Islam	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester VI

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1303151	Politik dan Demokrasi	2
2	1303152	Politik Hukum	2
3	1303123	Kaidah-Kaidah Fikih	2
4	1303357	Hukum HAM	2
5	1303118	Filsafat Hukum Islam	2
6	1303153	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
7	1303146	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2

8	1303122	Retorika Hukum	2
9	1303135	Administrasi Peradilan Agama	2
10	1303125	Praktek Peradilan Agama	2
11	1303120	Hukum Adat	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

### Semester VII

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	1303112	Sosiologi Hukum	2
2	1303132	Etika Profesi Hukum	2
3	1303126	Bantuan Hukum	2
4	1303358	Pemilu dan Partai Politik	2
5	1303147	Studi Naskah Fikih	2
6	1000213	KKN	4
<b>JUMLAH</b>			<b>14</b>

### Semester VIII

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	1000214	Skripsi	6
<b>JUMLAH</b>			<b>6</b>

## I. PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kurikulum yang berlaku sekarang di jurusan Hukum Tata Negara/Jinyah Siyasah ada 4 kurikulum

Perubahan Kurikulum yang dilakukan oleh jurusan HTN/JS dari tahun 2012 /2018 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yakni

- a. Perubahan Kurikulum tahun 2012
- b. Perubahan Kurikulum 2016
- c. Perubahan Kurikulum 2017
- d. Perubahan Kurikulum 2018

Dengan perubahan kurikulum pada tahun 2012 ( adalah perubahan dari kurikulum 2010 ) , ada beberapa mata kuliah yang baru , seperti, mata kuliah Sosiologi Politik,perbandingan hokum pidana,perkembangan Hukum Pidana Islam di Indonesia., kaidah kaidah figh. Peambahan mata kuliah mata kuliah ini dimaksudkan agar lulusan jurusan JS semakin menampakkan sisi ketatanegaraan Islam dan Pidana nya ( Islamnya)

Perubahan kurikulum dari tahun 2012 ke tahun 2016 ada beberapa mata kuliah baru yang muncul akibat dari perubahan kurikulum tersebut seperti Mata Kuliah Sejarah Hukum Ketatanegaraan Islam , Sejarah Hukum Ketatanegaraan Islam,Bahasa Arab Qiraah wa Kitabah, Hukum Ketatanegaraan Islam, Reading Teks on Islamic Law,Dasar-Dasar Hukum Ketatanegaraan Islam, Islam dan Budaya Minangkabau, Fikih Wakaf, Hukum Keuangan Islam, Hukum Humaniter, Hukum Humaniter. Politik dan Demokrasi,hokum konstitusi, lembaga Negara, hk. Agrarian, Hukum dan HAM, Pemilu dan Parpol,Study Naskah, Retorika Hukum,Fugh zakat dan wakaf, jarimah hudud, hadis hadist tentang pidana dan tata Negaradan ada jrimah kisas dan takzir

Perubahan kurikulum dari, kurikulum 2016 ke 2017, hal ini disebabkan karena , izin prodi yang keluar hanyalah HTN Islam, tanpa ada jinayahnya, otomatis kurikulumpun harus menyesuaikan keraha HTNI, dg menghilangkan beberapa mata kuliah Jinayahnya, dengan lebih menekankan pada Siyasahnya (HTNI). Dengan arti kata menghilangkan beberapa mata kuliah Pidana Islamnya( Jinayahnya) dengan menambah Mata kuliah HTNnya seperti ada mata kuliah Hukum

Konstitusi, Hukum HAM, lembaga Negara, Ukum agararia, demokrasi dan konstitusi, hokum acara Mahkamah Konstitusi. Mata kuliah seperti jarimah Hudud, hokum kisas dan takzir dihilangkan.

Penambahan beberapa mata kuliah di jurusan HTN/I adalah juga dikarenakan rekomendasi dari asosiasi Jurusan JS/HTN, dari rekomendasi Asosiasi itu ( Bicososh) ada 15 mata kuliah yang setidaknya harus seragam diseluruh Jurusan HTN, matakuliah mata kuliah yang disebutkan diatas adalah diantaranya.

Perubahan kurikulum yang dilakukan oleh jurusan HTN/JS adalah dalam rangka untuk meningkatkan mutu lulusan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Craft(1994), Craf berpendapat “bahwa pendidikan tanpa menjamin kualitas tidak membenarkan upaya dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapainya dan pendidikan tanpa kualitas akan tidak hanya "membutakan kehidupan siswa tetapi juga merusak kemampuan mereka untuk bersaing dan bertahan hidup di dunia (Craft A, editor International developments in assuring quality in higher education. London: Falmer Press; 1994.) ) dalam [Prosiding Seminar Nasional Teknoin, 2008 - jurnal.uui.ac.id](#)

Pendidikan kata Nelson Mandela adalah *Education is the most powerful weapon which you can use the change the world*”, pendidikan adalah senjata yang kuat yang bisa digunakan untk mengubah dunia. Jika ingin memperbaiki kehidupan, memperbaiki masa depan, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa, dan bahkan mengubah dunia, maka jawabannya satu: Pendidikan.

UU No.20 Tahun 2003 Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional . disebutkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. ( Ketentuan Umum Pasal 1ayat (1))

Kualitas manusia hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan, pendidikan yang bagaimana? Adalah pendidikan yang memperdayakan, sebuah proses pendidikan yang membuat individu menjadi mandiri, mampu berpikir kritis, inovatif, berkarakter, dan berdaya saing. (Ali Maksu dalam seminar nasional hasil penelitian pendidikan dan pembelajaran, 25-26 April 2015 di STKIP PGRI Jombang)

Oleh sebab untuk melahirkan manusia yang berkualitas maka itulah Perguruan Tinggi dituntut berkualitas, DIKTI menetapkan 6 standar untuk melahirkan pendidikan yang berkualitas yakni

1. capaian pembelajaran (**learning outcomes**) yang jelas;
2. Organisasi PT yang sehat;
3. Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel
4. Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja;
5. Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional;
6. Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai | Buku K-DIKTI.2014)

Pendidikan yang memperdayakan sebagai mana yang telah disebutkan oleh Ali Maksu di atas adalah, pendidikan yang memberdayakan yang menempatkan peserta didik sebagai insan yang aktif dan dengan segenap potensi yang dimilikinya, mampu mengonstruksi pengetahuan dan pengalamannya. Sebagaimana lima pilar yang dikampanyekan Unesco (2009a), yakni *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to transform one self and society*. Dengan demikian, individu pembelajar tidak sekadar tahu tetapi juga mampu mengonstruksi pengetahuan, terampil menerapkan pengetahuan yang dimiliki, baik dalam konteks dirinya maupun lingkungan masyarakatnya.

Dan ini tentu sesuai dengan tujuan pendidikan kita Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem **Pendidikan Nasional**, Pasal 3, **tujuan pendidikan nasional** adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik, oleh sebab itu

Rekonstruksi kurikulum menjadi agenda yang urgen untuk dilakukan, itulah yang telah dilakukan untuk kurikulum HTN untuk melahirkan lulusan yang berkualitas.

Menarik dari kurikulum yang telah ditampilkan diatas, bahwa dalam 2 tahun terakhir ada 4 kurikulum yang berlaku, yakni

1. Kurikulum Jinayah Siyasah Tahun 2012 ( SMT VI untuk Bp.2016)
2. Kurikulum Jinayah Siyasah Tahun 2016 untuk Semester II/ IV
3. Kurikulum HTNI yang berlaku untuk tahun 2017/2018
4. Kurikulum HTN yang berlaku untuk tahun 2018

Bisa kita lihat dalam rancangan matakuliah semester genap dibawah ini

## MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017-2018

### Semester II

No	Kode MK	,Mata Kuliah	SKS
1	21101	Kewarganegaraan	2
2	21102	Bahasa Arab Qiraah wa Kitabah	2
3	21103	Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam	2
4	21104	Pengantar Studi Pemikiran Islam	2
5	221020001	Fikih Jinayah	2
6	221020002	Pengantar Ushul Fikih	2
7	221020003	Fikih Siyasah	2
8	221020004	Akhlah Tasawuf	2
9	221020005	Pengantar Hukum Indonesia	2
10	221020006	Tafsir Ayat Ketatanegaraan	2
11	221020007	Reading Teks on Islamic Law	2
12		Fikih Amali	
13		Praktik Qira'ah	0
JUMLAH			22

	<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>NAMA DOSEN</b>	<b>SKS</b>
1	41101	ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU		
2	41302	METODOLOGI PENELITIAN		
3	421020003	JARIMAH QISHASH DAN TA'ZIR		
4	422020004	MEMBAHAS KITAB STANDAR		
5	421020005	HUKUM KEUANGAN NEGARA DALAM ISLAM		
6	421020006	HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN ISLAM		
7	421020007	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA		
8	421020008	FIQH MAWARIS		3
9	421020009	PERADILAN AGAMA DI INDONESIA		
10	421020010	HUKUM TATA NEGARA		
11	421020011	TAFSIR AHKAM		
12	-	PRAKTEK DAKWAH DAN KUTBAH		0
<b>JUMLAH</b>				<b>23 SKS</b>

#### SEMESTER IV (KURIKULUM 2016)

#### SEMESTER VI (KURIKULUM 2012)

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>NAMA DOSEN</b>	<b>SKS</b>
01	62120302000 1	Filsafat Hukum		2
02	62120302000	Hukum Adat		2

	2		
03	62120302000 3	Tafsir Ahkam ttg Jinayah dan Siyasah	2
04	62120302000 4	Hadis Ahkam ttg Jinayah dan Siyasah	2
05	62120302000 5	Al-Fatwa/Metode Ijtihad	2
06	62130302000 6	Bantuan Hukum dan Kebijakan Publik	2
07	62130302000 7	Hukum Acara Peradilan Agama	2
08	62120302000 8	Perkm. Politik Islam di Indonesia	2
09	62130302000 9	Hukum Acara Pidana	3
10	62130302001 0	Hukum Acara Perdata	2
11	62120302001 1	Lembaga Keuangan Syari'ah	2
<b>Jumlah</b>			<b>23</b>

Untuk semester ganjil 2018 ini ada 3 kurikulum yng berlaku

No		Mata Kuliah
1	31101	FILSAFAT ILMU
2	321020002	JARIMAH HUDUD
3	321020003	PEMIKIRAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM
4	321020004	FIQH MUNAKAHAT
5	321020005	METODOLOGI ISTINBATH HUKUM ISLAM



6	321020006	ILMU MANTIK
7	323020007	PENGANTAR ILMU SOSIAL
8	321020008	HUKUM PERDATA
9	321020009	HUKUM PIDANA
10	321020010	AKHLAK
11	321020011	FIKIH MUAMALAH
<b>JUMLAH</b>		

1. Kurikulum tahun 2012 untuk semester VII (Bp.2015 )
2. Kurikulum 2016 untuk Semester V ( Bp. 16 )
3. Kurikulum HTN untuk Semester I dan Ssemester III

Banyak kurikulum yang berlaku menimbulkan persoalan-persoalan:

a. Ada mata kuliah yang terlupakan

Dengan banyaknya mata kuliah, mengakibatkan membuat bingung pengelola ( jurusan), yang terjadi hari ini adalah ada 3 mata kuliah yang terlupakan, dan baru ingat salah kuliah minggu ke 5, hal ini diungkapkan mahasiswa Bp .15 dan itu dibenarkan oleh dosen pengampu mata kuliahnya yakni: Mata Kuliah :

1. Perkembangan Hukum Pidana Islam di Indonesia
2. Politik Islam di Indonesia
3. Sosiologi Politik

Mata Kuliah Untuk BP. 15 ( Smt VII)

Tapi yang baru bisa diambil cuma dua mata kuliah, yang satu lagi, yakni Mata Kuliah

Sosiologi politik, belum bisa ditawarkan, dan itu baru bisa diambil untuk semester VIII, jadi harapan untuk percepatan masa study menjadi terhalang, sebab ada beberapa mahasiswa yang berprestasi jadi tidak bisa untuk tamat, pas 3,5 tahun, sebab belum bisa dikarenakan ,kompre baru bisa jika telah

lulus semua mata kuliah. Jadi disemester ini yang ditawarkan adalah hanya 18 SKS

Dan untuk semester depan ( VIII) mereka harus mengambil 1 Mata kuliah lagi ( Sosiologi Politik), yang semestinya adalah di Smt VIII itu mereka hanya magang di PA Sumbar, tanpa dibolehkan mengambil beban SKS lagi.

b. Ada mata Kuliah yang tidak ditawarkan lagi

Ini mengakibatkan mahasiswa yang belum mengambil atau belum lulus, menjadi bingung, bagaimana cara mengulang dan mengambil atau memperbaiki nilai? Sebab mata kuliah itu tidak ditawarkan lagi, seperti mata kuliah Ulumul Qur'an, Figh 2, Jarimah Huhud, Jarimah Qishas dan Ta'zir, dan hokum keuangan Islam, jika mata kuliah ini belum diamabil dan belum lulus kemana dan apa pengantinya?

Penerapan lebih dari 1 (satu) kurikulum akan menimbulkan banyak persoalan pada perguruan tinggi yang mempunyai mahasiswa yang banyak seperti UIN IB ini tentu akan mengakibatkan banyak mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu. Dampak yang akan muncul adalah :

1. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan per-semester akan bertambah
2. Jika menjalankan kelas paralel butuh ruang yang lebih banyak
3. Administrasi akademik harus teliti dan rapi
4. Jumlah SKS mengajar dosen bertambah
5. Kebutuhan sarana mengajar meningkat
6. Sistem Informasi Akademik (SIA)/( di UIN IB Portal ) harus bisa mendukung operasional 2 s/d 3 kurikulum sekaligus dan disetujui oleh semua universitas di Indonesia.

Oleh karenanya Perguruan Tinggi ( Fakultas ) seperti UIN , sebaiknya perubahan kurikulum itu dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan seperti setiap enam

semester atau paling banyak sepuluh semester berikutnya, setelah diterapkan kurikulum baru, semua program studi wajib merevisi kurikulum-nya lagi. Bayangkan saja jika saat ini studi yang bersangkutan menjalankan kurikulum 8 semester sementara banyak mahasiswa yang belum lulus tepat waktu maka sudah dipastikan suatu saat program studi tersebut akan menjalankan 3 kurikulum sekaligus.(garuda cyber Indonesia, tanggal.9-2-2018), inilah yang dialami oleh fakultas syariah, terutama oleh jurusan HTN/JS.

Dalam Teori ada Dua Cara Perubahan Kurikulum

### **1. Ekivalensi kurikulum**

Ekivalensi kurikulum adalah proses penyesuaian kurikulum lama ke kurikulum baru. Pelaksanaan ekivalensi kurikulum ini berlaku bagi semua angkatan, termasuk mahasiswa yang telah menempuh kurikulum lama juga harus mengikuti pergantian kurikulum. Tujuannya untuk menjaga kualitas akademik yang dimiliki suatu perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan ekivalensi kurikulum perguruan tinggi harus memegang beberapa prinsip yang yaitu, tidak merugikan mahasiswa, tetap menjaga kualitas dan mutu pembelajaran, menyederhanakan ekivalensi, dan diupayakan arah maju (tidak mundur ke semester/tingkat yang sudah lulus).

### **2. Non ekivalensi kurikulum**

Non Ekivalensi kurikulum adalah penerapan kurikulum baru hanya untuk mahasiswa angkatan baru saja sementara mahasiswa lama tetap menggunakan kurikulum lama, yang artinya perguruan tinggi yang bersangkutan pada waktu yang sama menjalankan lebih dari 1 kurikulum

Kalau membahas pemahaman mana yang lebih baik, tentu ekivalensi kurikulum adalah jalan terbaik. Memang undang-undang tentang perubahan kurikulum ini tidak mengikat, perguruan tinggi boleh memilih sesuai kebutuhan kampus. Alasan kenapa ekivalensi lebih baik adalah :

- a. Kampus akan terhindar dari pelaksanaan lebih dari 1 kurikulum yang berjalan bersamaan. Kurikulum perguruan tinggi harus menyesuaikan Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Artinya perguruan tinggi anda tanggap terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan lulusan
  - b. Transkrip nilai mahasiswa sesuai dengan Permendikbud no 81 tahun 2014 pasal 6 (o) tentang Ijazah dan Transkrip nilai.
  - c. Ekivalensi adalah cara yang paling baik untuk *civitas* akademik perguruan tinggi, meskipun tahapan ekivalensi tidak semudah yang kita bayangkan. Dan rata-rata Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia telah menerapkan Ekivalensi kurikulum.
- c. Ada 3 ( Tiga Jurusan )
- Persoalan ini tidak saja ada 3 kurikulum, yakni kurikulum JS(untuk BP. 12,13,14,15 )Kurikulum HTNI untuk BP 17 dan Kurikulum HTN untuk Bp. 18, tapi ada **juga 3 jurusan, jurusan JS, HTNI dan HTN**. Sementara yang baru terakreditasi adalah jurusan JS ( IAIN IB), sementara HTNI/HTN belum, yang perlu diselidiki lebih lanjut adalah, dari yang ketiga jurusan ini, yang mana yang terdaftar diporlap dikti?. Untuk persoalan diatas menurut salah seorang dosen senior JS/HTN, akreditasi yang dihitung sesuai dengan tanggal dan tahun kelulusan.
- d. Perubahan kurikulum yang tidak mengikuti desain perubahan kurikulum

Dalam perubahan kurikulum ada teoriteori yang bisa jadi pedoman, dan jika tidak akan menimbulkan mata kuliah dan silabus yang tumpang tindih, begitu dengan pemekaran mata kuliah harus memikirkan materi ajarnya, persolan ini lah yang dihadapi oleh jurusan HTN/JS saat ini, pemekaran mata kuliah Figh Siyasa, menjadi beberapa mata kuliah, selain tata letak yang tidak berkaitan dan berkesimanbungan juga materi materi apa yang mesti masuk kedalam silabus juga menjadi persoalan.....

Mata kuliah mata kuliah yang ditawarkan dalam silabus mesti mempertimbangkan flosofi dan keterkaitan dan kesimanmbungan, antar mata kuliah satu berkaitan dengan mata kuliah lain, yang merupakan rangkaian yang tak terputus dan tuntas.

Mata kuliah teori harus diletakkan diawal semester, karena ada mata kuliah praktek atau hokum nya yang akan ditawarkan pada semester selanjutnya, demikian juga dengan mata kuliah pengantar, pasti ada mata kuliah yang akan diantarkannya, mata kuliah ini tentu diletakkan diawal semester, tapi di Jurusan HTN/JS itu masih kacau, seperti ada mata kuliah, sejarah studi peradaban Islam diletakkan di semester 2, semestinya itu disemester 1, sementara mata kuliah, sejarah hokum ketatanegaraan Islam diletakkan disemester 1, semstinya di semester 2, dan mata kuliah Hukum Ketatanegraan Islam harus di semester 3, bukan semester 2, sebagaimana yang diperlakukan hari ini.

e. Perubahan Kurikulum JS/HTNKarena Perubahan Status dn Pradigma Keilmuan

Perubahan status itu salah satu inplikasinya adalah berubahnya gelar kesarjanaan dari SHI menjadi SH, ( PMA RI) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. Dan juga dikarenakan izin perpanjangan izin prodi. Dalam perpanjangan izin prodi, memang Jinayah dan Siyasa yang diajukan tapi yang keluar cuma izin Siyasa ( HTNI ) saja, tanpa Jinayahnya ( Pidana Islam) . Prodi HTN dulunya adalah dikenal dengan prodi JINAYAH SIYASAH

yang disingkat dengan JS. Dengan keluarnya hanya satu prodi Siyasah saja maka otomatis, kurikulum tentu harus berubah.

Perubahan kurikulum JS TH 2012 ke Kurikulum JS Tahun 2016 adalah perubahan sesuai dengan kurun waktu, dan itu direncanakan dan diikuti oleh seluruh dosen terutama dosen yang tergabung dalam kelompok dosen JS dan ditambah dosen bidang ilmu lain yang terkait dosen, dan beberapa undangan misalnya dari Stakeholder seperti Perubahan demi perubahan yang dilakukan dahulu dan dipraktekkan memang tidak sebagiman seharusnya perubahan ( pengembangan) yang diamatkan oleh kurikulum ( ahli kurikulum) ada syarat dan ketentuan yang mesti diikuti, misalnya tentang landasan dan bagiman mendesainnya, dan stuktur kurikulum bagaimana yang akan diterapkan dan sebaginaya. Tapi berdasarkan hasil musyawarah dan tanpa mengabaikan perkembangan keilmuan.

Dengan perubahan dari Jinayah Siyasah ke HTNI akibat izin prodi yang keluar hanya Siyasah (HTNI) tanpa jinayah tentu harus diikuti dengan perubahan kurikulum.maka keluarlah kurikulum HTNI, kurikulum HTNI ini umurnya Cuma 1 tahun, dikarenakan berubahnya gelar kesarjanaaan ( dengan keluarnya PMA no.33 Tahun 2016, maka kurikulum HTNI ini diubah mananya dengan kurikulum HTN, dan diikuti dengan perubahan nama jurusan dan sekarang jurusan nya adalah jurusan HTN. sebab itulah ada 3 kurikulum yang berlaku saat ini di Jurusan HTN. Kurikulum Tahun 2012 untuk mereka yang tahun masuknya (bp 12) sampai Bp 15 dan kurikulum HTNI untuk yang ber BP.2017 dan HTN untuk 2018.

Perubahan kurikulum 2016 dan kurikulum 2017 adalah, karena perubahan pradigma, yakni dengan KKNi. Dalam Kurikulum KKNi yang sesuai dengan UU no 12 TAHUN 2012 Dan Perpres No 8 Tahun 2012 Untuk melakukan perubahan kurikulum ada beberapa hal yang harus jadi pertimbangan, perubahan harus dilakukan secara berkala, perubahan dilakukan oleh aspek, aspek internal,aspek eksternal. Untuk aspek internal :

1. Tradisi 4-5 tahun
2. Kehendak dari yang terlibat langsung( penyelenggara)

3. Karena perubahan aturan lembaga ( perubahan Visi dan Misi Universitas
  4. Perubahan kebutuhan mahasiswa
- Perubahan karena adanya aspek eksternal :

- a. Perkembangan IPteks
- b. Perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan ( stakeholders)
- c. Kecendrungan masa depan

Perubahan kurikulum di lingkungan Fakultas UIN IB adalah dikarenakan karena ada tranformasi dari IAIN ke UIN

Dan perubahan itu diikuti dengan perubahan VISI Dan Misi,

- f. Kurikulum JS/HTN Dalam Berbagai Makna ( dalam pandangan Dosen)

Pengalaman perubahan kurikulum di lingkungan Jurusan HTN mungkin merupakan salah model penyikapan terhadap proses perubahan/inovasi kurikulum . Pentingnya dokumen kurikulum hasil perubahan, yang mungkin berisikan hasil perubahan visi, misi, serta materi kurikulum jarang memainkan peran lebih, selain merupakan bagian dari rangkaian cerita dari perubahan/ pengembangan kurikulum.Perubahan kurikulum di Fakultas syariah dan JS/HTN khususnya, barangkali sampai saat in ada sebagian dosen yang belum tahu, sebab sampai saat ini sosialisasi terhadap kurikulum baru ( yang berdasarkan KKNi ) belum pernah, walaupun ada ada rapat dalam penyusunan RKPPS dan capaian pembelajaran, dan barangkali banyak yang tidak tahu bahwa peyusunan RKPPS dan capaian pembelajaran adalah bagian dari kurikulum, sampai saat ini banyak dosen yang tidak membuatnya, bahan ajar/silabus sampai saat ini ada yang belum punya, atau walaupun ada, terjadinya ketidak seragaman,padahal matakuliahnya sama.

Salah satuPenyebabnya ini adalah dosen sebagai ruh kurikulum tidak diberi peran dalam pengembangan kurikulum

Akibat tidak terlibatnya dosen dalam pengembangan kurikulum yang berlaku saat ini, Nampak dalam dukumen kurikulum HTN/JS saat ini , Murray Print (1993 ) dalam Al Ibtida, Vol. 3 No. 1, Juni 2016 ada tiga peran guru/dosen, 1. Implementer,2. Adapter ( penyelaras ) 3. Developer

Ini pun sesuai dengan ketentuan KPT ( Kurikulum PT) . Peralihan dari kurikulum KKNi HTNI 2016 ke kurikulum 2017, adalah suatu hal yang tidak diketahui dosen hanya mereka yang duduk di jurusan saja yang tahu dan terlibat. Belum lagi selesai dan disosialisasikan datang lagi kurikulum 2018 ini akibat dari izin prodi, yakni izin yang diakui saat ini hanyalah prodi HTN, dan izin untuk prodi Jinayah ( pidana) ngak jelas rimbanya.

Dokumen kurikulum di kknj js/htn 2018, akibatnya tidak terlibatnya dosen, hanya jurusan saja, ketua. Maka timbul beragam makna dan persoalan dari kurikulum itu, selain yang telah diuraikan diatas tadi. Sperti:

1. Kurikulum ganti kulit,
2. Kurikulum yang penempatan mata kuliah yang tidak tepat
3. pemakaian istilah ganda
4. ada mata kuliah yg tidak berkesenambungan
5. kepastian tentang ranah kurikulum
6. perubahan nama jurusan tidak diikuti dengan perubahan isi
7. silabus yang tidak seragam dan tidak ada adalah persoalan besar saat ini , belum adanya silabus, untuk kurikulum 2016 saja, misalnya Hukum Hak Azasi Manusia, Kapita selekta HTN, ( mata kuliah ini akan ditawarkan pada Semester depan ) apalagi untuk kurikulum 2018 ini.
8. jurusan HTN Kurikulum JS
9. ketidak konsisten dalam pemakaian nama mata kuliah, pakai bahasa arab atau bahasa Indonesia
10. Tentang nama jurusan yang berbeda antara pustipanda dengan yang ada di Fakultas.  
Untuk Smt I dan Smt III, pustipanda tetap memakai jurusan HTNI, padahal yang HTNI itu hanya Semester III dan Smt I adalah HTN, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mahasiswa dan buktinya bisa dilihat dalam KRS kedua angkatan tersebut.
11. Tidak konsisten dalam pemakaian bahasa,  
Ada mata kuliah dalam bahasa arab, bahasa inggris dan bahasa Indonesia.
12. Masih sibuk dengan pengkodean Mata Kuliah



Yang membingungkan mata kuliah yang berbeda tapi kodenya sama, buktinya boleh lihat di buku Pedoman Akademik dan ini juga diungkapkan oleh Pegawai Akama sendiri, menurut mereka ,pusipanda, akama, tidak ada saling koordinasi. Hal yang sangat memprihatinkan adalah, sewaktu pergantian dari sispo ke portal, mis mata kuliah saya adalah Hk. Agraria.tapi nilainya adalah nilai mata kuliah Hk. Adat, padahal, mata kuliah itu dipegang oleh dosen yang berbeda, ini ketahuan sewaktu ada laporan dari mahasiswa yang nilai awalnya adalah A, kemudian menjadi C.ternyata yg C itu adalah nilai Hk. Adat.

Dan banyak persoalan lain. seperti, kalau dulu dipakai istilah Fikih Siyasa, sekarang Hukum Tata Negara Islam, sebaiknya juga seperti ada Fiqih Amali, fiqih mualamah, fiqih munakahat, sebaik juga dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia.untuk ungkapan diatas memang tidak salah,ada bagian perubahan itu dilakukan dengan mengganti istilah saja, misalnya Fiqih Siyasa dengan Hukum Tata Negara Islam. Mengapa ini terjadi, menurut kalangan dosen khususnya dosen JS begitu kami menyebutnya, ruang pertemuan itu yang tidak ada, entahlah apa penyebabnya, apa mungkin dana yang tidak ada, atau apa, tapi dari perbincangan peneliti, jangan itu dijadikan alasan untuk tidak berkumpulnya dosen dalam membicarakan lembaga kedepan, kami toh tidak berpikir demikian juga kata mereka. Silabus adalah stuktur kurikulum perlu kebersamaan membahasnya ( kerja Tim), kasus yang terjadi di jurusan HTN/JS, mata kuliah yang ditawarkan sekarang ( mata kuliah baru) satupun belum ada slabusnya, sewaktu penyerahan kedosen mata kuliah, dosen menjadi keran dan kelabakan,padahal mata kuliah itu ditawarkan pada semester yang sedang berajalan saat ini, mata kuliah itu mesti dijalankan(misalnya pada Smt 1) ini dosen kebingungan membuatnya, harus siap jadi, mestinya tidak demikian, waktu mata kuliah ditawarkan silabusnya sudah ada seperti yang dialami oleh dosen mata kuliah pengantar studi ketatanegaraan Islam dan hokum keuangan Islam ini tidak,mata kuliah ditawarkan dan tahun ajaran masuk ( perkuliahan dimulai)dosen kelabakkan.( seperti yang dikatakan oleh Dr. Azhariah Khalida.kedua mata kuliah ini adalah mata kuliah baru. Dan sebagian bahan kuliah ini pula diberikan dalam mata kuliah Figh Siyasa. Dan mata

kuliah Hk. Keuangan Islam ini untuk kurikulum 2016 tidak ditawarkan lagi.

Kemudian istilah istilah dalam mata kuliah di kurikulum 2018 ini ganda dan akibatnya ada mata kuliah yang ganda juga, menurut penuturan dosen JS adalah membahas hal yang sama, seperti, reading tex of Islamic dengan studi naskah ( belum ada silabunya juga) menurut mereka adalah membicarakan materi yang sama, Cuma satu nama mata kuliahnya dalam bahasa Inggris satu lagi dalam bahasa Indonesia. Mata mata kuliah lain yang mirip, itu perlu kesepakatan dalam penekanan materinya, misalnya politik hokum, politik dan demokrasi, pemilu dan demokrasi.

Disamping itu persoalan adalah masalah penempatan mata kuliah, ada yang seharusnya disemester awal misalnya semester 2 atau 3 tapi diletakkan pada semsester 4, menurut penuturan dosen pengampu mata kuliah tersebut terlalu lama untuk belajarnya, semestinya bersamaan dengan mata kuliah Ushul Figh, demikian juga mata kuliah Sejarah Hukum Islam lebih dahulu ditawarkan, sebaiknya ditawarkan setelah Mata Kuliah Pengantar Studi Hukum Islam, dan hokum Tata Negara Islam ( ganti dari Fihf Siyasa 2 ) terlalu cepat juga ditawarkan sebaiknya bersamaan dengan Mata Kuliah HTN umum di Semester 3

Fihf Amali sebaiknya ditawarkan sebelum Hukum Tata Negara Islam, menurut dosen pengampu Mata kuliah tersebut, bicara amalan/ ibadah, baru bicara Negara. Dan masih banyak mata kuliah kuliah lain yang tidak tepat letaknya tentang Mata kuliah Hukum Adat, yang semsestinta ditawarkan sebelum Hukum Agrarian.

Persoalan yang selalu dipertanyak oleh dosen kelompok Js ini adalah mau kemana kurikulum ini akan dibawa? Ke Hukum Tata Negarakah, Ke Politikkah ? atau Ke Siyasaakah? Sebab keiga tiganya mepuyaiporsi yang hamper sama

Misalnya utuk Politik ada mata kuliah

1. politik hokum
2. politik dan demokrasi
3. pemilu dan politik

Untuk HTN misalnya

1. dasar dasar ketatanegaraan islam

2. hk. Per UU Islam
3. Hk. Tata Negara Islam
4. Sejarah Hukum Ketata Negaraan Islam
5. Hukum Keuangan Islam
6. Sejarah Pemikiran Islam dan sebagainya  
Dan untuk HTN ada pula
  1. HTN
  2. HAM
  3. Lembaga Negar
  4. Hk. Konstusi
  5. Beracara di MK
 Dan sebagainya

Untuk mengatatasi hal diatas ada yang harus diperhatikan oleh pimpinan fakultas syariah.

### **1) Tahab Tahab Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks, multidimensi dan multilevel dimulai dari kurikulum yang ada. , perbaikan kurikulum perlu didasari atas analisis *past*, *present*, dan *future* terhadap berbagai dimensi kehidupan.

Demikian pula analisis SWOT terhadap kurikulum yang ada dan hasil *tracer study* terhadap kinerja lulusan. Selanjutnya, prodi perlu menetapkan kembali profil lulusan, *learning outcome* (LO), mata kuliah dan bobotnya, struktur kurikulum dan program semester, standar pembelajaran, dan penilaiannya. Perbaikan kurikulum perlu dilakukan secara sistemik dan menyeluruh agar mencakup program universiter, fakulter, jurusan dan prodi. Agar terjadi kesamaan pola pengembangan kurikulum di semua prodi,

untuk pengembangan telah mengembangkan tahapan tahapan dalam penyusunn kurikulum

1. Penyusunan kurikulum berdasarakan kebijakkan universitas dan Prodi/jurusan yang didasari analisis past,presen dan future yang termuat dalam Naskah Akademik  
Yang didasrkan pada landasan pengembangan kurikulum
2. Ada Tim pengembang yang tugasnya adalah mengembangkan kurikulum prodi
3. Dan itu melibatkan kelompok studi/bidang studi
4. Dan melibatkan semua dosen

5. Setelah melakukan analisis Swot dan hasil dari tracer studi
6. Dan adanya peta keilmuan program studi yang berdasarkan pada :
  - a. Tingkat keluasan
  - b. Tingkat kedalaman
  - c. Tingkat kemampuan yang akan dicapai
  - d. Konsep mata kuliah dan beban sks
7. Dukumen kurikulum baru, setelah dilokakaryakan.

## 2 )Prinsip Pengembangan Kurikulum

Prinsip pengembangan kurikulum bisa kita lihat seperti yang dilakukan oleh IPB, seperti dibawah ini Pengembangan kurikulum prodi didasarkan atas ilmu dan prinsip prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.

1. Perubahan kurikulum dipandang sebagai hal yang memang harus terjadi oleh karena perubahan ilmu, teknologi, seni, dan budaya masyarakat.
2. Pengembangan kurikulum didasarkan pada kurikulum sebelumnya melalui proses evaluasi diri, *tracer study*, dan kajian futuristik yang mendalam.
3. Pengembangan kurikulum merupakan kerja tim bukan perorangan yang melibatkan dosen, mahasiswa, *stakeholders*, dan unsur-unsur terkait lainnya. ( Kurikulum HTNIdan HTN adalah hal yang tidak dilakukan sama sekali.
4. Pengembangan kurikulum prodi didasarkan atas Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang

disingkat KKNI yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. ( Dukumen Perancangan dan Pengembangan Kurikulum Fak. Ekologi

Manusi IPB No.Dokumen : POB-IKK-S1-01 tanggal  
belalu 09/02/2015

untuk itu dalam perubahan kurikulum jangan melupakan  
landasan kurikulum

Paling tidak ada tiga faktor yang membuat kurikulum  
harus selalu dirubah atau diperbaharui.

Pertama, karena adanya perubahan filosofi tentang  
manusia dan pendidikan, khususnya mengenai hakikat  
kebutuhan peserta didik terhadap  
pendidikan/pembelajaran.

Kedua, karena cepatnya perkembangan ilmu dan  
teknologi, sehingga subject matter yang harus  
disampaikan kepada peserta didik pun semakin banyak  
dan berragam

Ketiga, adanya perubahan masyarakat, baik secara  
sosial, politik, ekonomi, mau pun daya dukung  
lingkungan alam, baik pada tingkat lokal maupun global.  
Karena adanya faktor-faktor tersebut, maka salah satu  
kriteria baik buruknya sebuah kurikulum bisa dilihat  
pada fleksibilitas dan adaptabilitasnya .(DIREKTORAT  
TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT  
JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN NASIONAL 2008, hal 1

### **3)Kurikulum dan Peran Pendidik ( Dan Perlibatannya)**

Suatu keputusan merubah, mengembangkan,dan  
kemudian melaksanakan suatu kurikulum merupakan pekerjaan  
sosiokultural. Keputusan untuk melaksanakan pengembangan  
akan didahului dengan terbentuknya opini khalayak utamanya  
tenaga pembelajaran bahwa kurikulum

lama perlu diperbaiki. Dengan kata lain, perlu adanya opini  
penolakan dari sejumlah khalayak terhadap sekian aspek pada  
kurikulum lama dan mengganti aspek tersebut pada kurikulum  
baru.

Proses penolakan terhadap kurikulum lama dan rencana  
merubah ini umumnya telah disepakati dan didukung oleh

kebijakan lembaga. Proses selanjutnya adalah proses pengembangan. Proses pengembangan merupakan proses yang relative lebih rumit. Proses pengembangan kurikulum bukanlah hanya merupakan proses teknis semata, namun melibatkan proses sosial antarpersonal di lingkungan lembaga pendidikan.

Proses pengembangan melibatkan proses sosial karena masing masing individu tenaga pendidik memiliki ideologi personal, predisposisi, nilai, dan kepercayaan yang berbeda terkait dengan perubahan dan pengembangan (Sparkes, 1990). Konsep personal tentang suatu issue atau pun paradigma tersebut akan dibawa ke dalam proses pengembangan kurikulum dan memberikan dorongan tindakan dalam proses pengembangan kurikulum baru. Saat kurikulum telah dikembangkan menjadi dokumen kurikulum baru, ideal proses berikutnya adalah sosialisasi pada seluruh khalayak personal tenaga pendidik untuk diimplementasikan. Dua proses ini merupakan proses paling rumit karena melibatkan sejumlah banyak personal tenaga pendidik dalam lembaga tersebut. Untuk aktivitas pembelajaran kelas Kirk, Macdonald & Tinning, 1997 dalam Jurnal *TEKNOLOGI DAN KEJURUAN*, VOL. 34, NO. 2, SEPTEMBER 2011: 227-239... . Saat yang bersangkutan menyikapi dengan bertahan dan menolak kurikulum baru, maksud perubahan ideal dari kurikulum baru akan jauh dari harapan.

Dokumen kurikulum baru hasil pengembangan tersebut dapat direspon secara positif, diterima dan ditindaklanjuti dengan komitmen membelajarkan diri terkait dengan persyaratan untuk proses implementasi. Namun tak jarang kurikulum baru tersebut ditolak, yakni banyak para personal pendidik yang memandang perubahan tersebut sebagai tugas tambahan dan menghabiskan sejumlah waktu, tenaga, serta pikiran. Banyak tenaga pendidik memberikan respon dan memilih bertahan daripada mengimplementasikan kurikulum baru.

Saat tugas utama tenaga pendidik pada proses implementasi adalah memaknai/menterjemahkan dokumen dan mengembangkan komunikasi *TEKNOLOGI DAN KEJURUAN*, VOL. 34, NO. 2, SEPTEMBER 2011: 227-239

Keberhasilan perubahan kurikulum baru mensyaratkan tenaga pendidik terlibat dalam rangkaian proses yang berbeda. Keterlibatan tenaga pendidik dalam proses perubahan kurikulum berhenti pada empat muara proses, yakni sebuah visi yang diberbagikan (*a shared vision*), suatu bahasa yang diberbagikan (*a shared language*), pengambilan keputusan yang diberbagikan (*shared decision making*), dan komitmen yang diberbagikan (*a shared commitment*) untuk melaksanakan kurikulum. Secara bersama dimensi ini membentuk bagian proses perubahan kurikulum dalam bidang pembelajaran

#### **4 ) Kurikulum Yang Horizontal Dan Vertical**

Dari apa yang dibicarakan diatas, maka pengembang kurikulum harus memperhatikan desain kurikulum. Disain kurikulum bukan hanya sekedar pengorganisasian empat komponen utama kurikulum ( tujuan, konten dan kegiatan belajar, serta evaluasi,)saja, tetapi mencakup pertimbangan mendalam tentang konsistensi internal dan kesatuan keempat komponen tersebut sebagai satu sistem. Sasarannya ialah supaya siswa menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pengembangan potensi mereka

Suatu hal yang harus diperhatikan adalah dalam mendesain kurikulum, banyak macam macam model desain yang ditawarkan ahli kurikulum, ada desain yang terpusat pada mata pelajaran ada desain yang terpusat mata siswa, dengan bermacam macam variasi.

Disain mana yang dipilih, satu hal yang perlu mendapat perhatian sekolah ialah untuk selalu peduli pada dua dimensi disain pokok yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi pertama berkaitan upaya untuk memperluas pengetahuan (*widening of knowledge*) sehingga siswa memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak terpisah-pisah seperti yang dipelajari siswa umumnya. Dimensi kedua dimensi vertical,diperlukan agar pengetahuan yang dipelajari siswa saling sambung menyambung sehingga makin lama makin dalam. Hanya dengan cara ini siswa dapat menguasai suatu bidang studi secara menyeluruh, mendalam dan tuntas. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pendidik dan perancang kurikulum tentang berbagai alternatif disain yang ada sangat diperlukan sebab

tanpa pemahaman ini sekolah atau pendidik cenderung merasa puas kalau siswa sudah menguasai mata pelajaran secara terpisah-pisah.(M. Ansyar 2015,298).Dengan memperhatikan desain kurikulum, tujuan dari pembelajaran akan tercapai.

## 5 ). **Lingkungan Yang Humanis**

Lingkungan yang humanis artinya , bahwa dalam belajar tidak hanya kurikulum/mata pelajaran yang jadi pokok utama tapi disamping itu, pengambil kebijakan harus juga memperhatikan lingkungan belajar, pihak penyelenggara pendidikan harus menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa(mahasiswa) agar dia bisa berkembang menjadi *a fully functioning person*( manusia seutuhnya) ( Ornstein & Hunkins,1998,181) dalam M.Ansyar ( 2015,280).

Artinya pihak penyelenggara pendidikan, harus memperhatikan sarana dan prasarana. Mengenai sarana prasarana,seperti toilet yang layak dan bersih, tempat ibadah, tidak cukup sekadar adanya ruang kuliah, tetapi juga laboratorium, perpustakaan, dan tempat diskusi yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi dan menggunakan sumber-sumber belajar secara optimal.

Seperti yang diusulkan oleh alumni JS Doni Darmawan “ *kalau bisa disediakan ruang siding untuk pelatihan peradilan semu. Dan penguatan IT, mungkin fakultas bisa bekerja sama dengan PTA untuk mendapatkan akses SIPP yaitu system penelusuran perkara yang menjadi basis administrasi di pengadilan*”( Wawancara tgl 17 september)

Disamping i itu menurut Doni Darmawan, harus ada pendidikan khusus, misalnya

1. Pendidikan telaaah kitab
2. Profil asesmen( uji kepribadian)
3. Penguasaan UU

Ini mungkin bisa dalam bentuk pelatihan pelatihan ( Wawancara tgl 17 sept 2018)

Demikian juga tempat/ruang untuk pengembangan bakat dan minat mahasiswa seperti karya ilmiah, olahraga, dan



kesenian. Dosen juga diberikan tempat/ruang untuk menjalankan aktifitas profesinya seperti membaca, menyiapkan perkuliahan, dan menerima konsultasi.

Tidak seperti saat ini, kalau kita lihat, misalnya kursi untuk mahasiswa saja tidak cukup, mahasiswa terpaksa mencari kursi dari lokal kelokal, kalupun ada kondisinya pun tidak layak, baru, tapi rapuh. Adanya peredam suara, bila hujan datang perkuliahan akan terganggu karena deras hujan lebih kuat dari suara dosen/ mahasiswa yang sedang berdiskusi.

Dan tak kalah penting juga adalah adanya pendingin udara, akan menghilangkan konsentrasi dalam perkuliahan. jika hal ini sudah tercukupi perkuliahan akan terimplementasi.

## 6 ) Implementasi Kurikulum

Disain kurikulum perlu diimplementasikan. Tidak ada gunanya kurikulum didisain, kalau tidak diimplementasikan dalam proses pembelajaran (Saylor&Alexander, 1974:245) untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini menunjukkan kaitan erat antara kurikulum dan pembelajaran, walau ada yang menganggap keduanya terpisah (Parkey, et.al.,2010:310). Karena itu, implementasi disain kurikulum dalam pembelajaran di sekolah merupakan bagian penting program pendidikan.

Apakah kurikulum yang telah didesain sedemikian rupa pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai? Di sinilah persoalannya. Pergulatan antara kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum *in action*. Acapkali kurikulum sebagai dokumen telah tersusun dengan begitu baik, namun pelaksanaannya jauh panggang dari api. Dalam konteks ini, peran pengelola kurikulum, dalam hal ini ketua program studi dan peran pelaksana kurikulum, yakni dosen, menjadi sangat urgen. Ada korelasi yang sangat kuat antara kepemimpinan akademik dan kualitas dosen terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum, Semakin tinggi komitmen Kaprodi dan dosen dalam melaksanakan kurikulum, semakin tinggi pula peluang keberhasilan capaian-capaian kurikulum. inilah yang mesti dilakukan di jurusan HTN( JS).

Dosen adalah ruhnya dalam peimplementasi kurikulum, maka pemegang Mata Kuliah haruslah orang yang menguasai bidangnya. Misalnya untuk Dosen Hukum Pidana tentu Sarjana Hukum Pidana, jangan sampai ada CPNS yang memegang mata kuliah sendiri, tanpa dosen pengampu, dan padahal itu bukan bidang keahliannya.

Demikian juga Prodi harus diberi ruang untuk mengembangkan diri, dengan menyediakan dana dan sarana yang mencukupi, seperti diberi kesempatan untuk ikut dalam klompok asosiasi jurusan HTN /JS yang kegiatan berlangsung tiap tahun, mata kuliah pengembangan hari ini adalah salah satu hasil dari pertemuan asosiasi( seperti yang diungkapkan oleh Mantan Ketua JS DR. Tiswarni ( wawancara, 12 Okto, 2018).

Beberapa mata kuliah pengembangan ini seperti, adanya mata kuliah Hk Agraria,hk. Pajak dan lain lain nya adalah hasil rekomendasi asosiasi dosen JS, yang dibentuk di Malang, *sayang kita tidak ikut, beberapa mata kuliah baru itu ada dan itu ditawarkan untuk JS ' itu itis ketahui waktu ada acara bicosh di Hotel Pangeran Padang" kami tak ikut, karena tak ada dana"*itu kataDR. Tiswarni, tentang adanya mata kuliah hasil rekomendasi kelompok jurusan JS ( asosiasi Jurusan JS)

## **7 ). EValuasi Kurikulum**

Evaluasi dan rekontruksi kurikulum harus dilakukan agar kurikulum itu berdaya , juga evaluasi tentang dosen yang mengimpenetasikan kurikulum, dari informasi ada dosen yang tidak masuk ( malas ) ini tentu harus ada teguran dari yang berwenang

Itulah yang harus jadi pertain bagi pimpinan lembaga syariah agar kurikulum ini menjadi berdaya ( kurikulum Yang memperdayakan ) dan mempunyai daya saing.

## **II. Strategi kedua, Membuat Grup Media Sosial ( Facebook)**

Anggota FB ini saat ini , telah beranggota sebanyak, 585 yang anggotanya ada yang sedang aktif kuliah da nada yang telah tamat, sejak didirikan pada tahun 2015 yang lalu, banyak info

yang hal hal penting ada dalam perkumpulan Fb ini,mulai dari khabar bahagia,sampai kabar duka.kabar tentang lowongan kerja dan informasi telah mendapat kerja ada dalam group ini. Dan group ini bisa digunakan oleh pimpinan untuk tracer study

### **III.Strategi Yang ke 3 adalah, membentuk alumni JS**

Ikatan alumni JS didirikan pada bulan 15 Juli 2017, di padang, yang saat ini diketuai oleh Doni Darmawan ( Hakim di PA Sawahlunto), banyak program yang dilakukan oleh alumni JS ini salah satunya adalah,ikut berpartisipasi dalam pengembangan jurusan kedepan, misalnya, mengadakan pelatihan untuk mereka yang akan mengikuti tes kehakiman tahun yang lalu alhamdulillah ada alumni JS yang diterima sebagai hakim ( 4 ) orang, kerjasama dalam bimngan advokasi hokumdengan APSI bagi mahasiswa yang tamadan akan diwisuda. Dan untuk mahasiswa yang berprestasi ada bantuan bea siswa, dalam waktu dekat juga kan dilakukan seminar Nasional. Disamping itu ikatan Alumni JS ini telah mengadakan pelatihan hokum bagi Alumninya yang bekerja sama dengan APSI sumbar. Dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya Lembaga Bantuan Hukum AJISI ( Alumni Jinayah Siyasa ) yang telah terbentuk .Wawancara dengan Latifah alumni, salah seorang pengurus Ikatan Alumni JS, 2016 )

#### **4. Strategi yang 4 adalah, MOU dengan jurusan HTN/ JS se PTKIN,**

yang tegabung dalam keanggotaan himpunan Jurusan JS/HTN, ( Alphutari ) kontribusi dari himpunan jurusan JS ini adalah, ada keseragaman dalam beberapa mata kuliah.khususnya untuk jurusan HTN/JS . Misalnya memasukkan mata kuliah Hukum Agraria untuk jurusan JS/HTN dan Mata kuliah Ilmu Negara untuk seluruh Jurusan di Fakultas Syariah.

#### **5. Strategi ke 5 adalah Pembentukan Buku Monitoring Mahasiswa,**

Yang gunanya adalah untuk melihat kemajuan penulisan skripsi mahasiswa.



## **BAB IV**

### **PENUTUP DAN KESIMPULAN**

Kesimpulan dan Saran :

1. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh jurusan HTN/JS dalam meningkatkan mutu lulusannya diantaranya adalah:
  - a. .Perubahan/Pengembangan Kurikulum
  - b. .Membuat Group Jinayah Siyasa/HTN di media Masa( Facebook)
  - c. Membentuk Ikatan Alumni JS/HTN
  - d. Ikut Dalam Asosiasi Jurusan JS/HTN seluruh Indonesia
  - e. Membuat buku monitoring mahasiswa
  - f. .Membuat Mou dengan prodi HTN lainDengan perubahan dan pengembagan kurikulum yang dilakukan oleh Jurusan HTN/JS, menimbulkan beberapa masalah, tapi semuanya untuk kemajuan kedepan
2. Dan disarankan, untuk rekontrusi kurikulum kedepan agar ilmu yang diterima mahasiswa tuntas. sebab ada persoalan persoalan yang timbul dan dalam pengemangan kurikulum itu,salah satu nya karena belum mempedomani cara mendesain yang betul dan benar.



## DAFTAR PUSTAKA

*Educare 31 Vol 4, No. 2.doc,jurnal unila*

H.B. Sutopo, *Konsep-Konsep Dasar Dalam Penelitian Kualitatif*, Surakarta: FKIP/FIS UNS, 1991.

Jurnal FENOMENA, *Vol 6 No 2*, 2014

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195705101985031-ENDANG\\_RUSYAN](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195705101985031-ENDANG_RUSYAN)

Kunandar. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

M. Ansyar, *Hakikat Dan Pondasi Kurikulum 2015*

*MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 9, NO. 2, DESEMBER 2005*

Moleong. Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhadjir. H. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. IV., Cet. II; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002

Mujahidin.Ahmad, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung, Indonesia : PT Refika Aditama, 2007.

*Peraturan Pemerintah No. 30/1990/ tentang perguruan t inggi;UU Sisdiknas no 20 tahun 2003;*

Robert S. Kaplan & David P. Norton, (2000), *Balanced Scorcard, MenerapkanStrategi Menjadi Aksi*, Jakarta: Erlangga;

Siagian, P. Sondang, 1995, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi  
Aksara;  
Soekarton, 1992, *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah  
Mada University Press